

# RENCANA KERJA

TAHUN **2025**



**DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmatNya, kami dapat menyusun Rencana Kerja ( RENJA) Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025. Rencana Kerja ( RENJA) Merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun kedepan dengan mempertimbangkan kondisi, potensi berdasarkan hasil analisis situasi dan masalah yang ada, kami berharap RENJA yang disusun dapat bermanfaat bagi terselenggaranya program Kesehatan yang baik dilingkungan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

Dengan adanya Renja ini diharapkan semua pihak yang terkait terutama Bidang/Seksi yang ada di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dapat menindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan secara optimal. Seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut akan dievaluasi pada akhir tahun untuk dinilai sampai sejauh mana keberhasilan dari kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan ini.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini Sudah melalui tahapan revisi yang disesuaikan dengan Permendagri No 86 Tahun 2017, Landasan hukum dan aturan yang mengatur perumusan renja ini masih banyak kekurangan sehingga masih membutuhkan saran dan kritik yang membangun.

Selanjutnya kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusunan renja ini.

Mahakam Ulu, 23 Februari 2024

Kepala Dinas Kesehatan P2KB



dr. Petronela Tugan, M.Kes  
NIP. 19780220 201012 2 009

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Sistematika Penulisan	6
<b>BAB II     EVALUASI    PELAKSANAAN RENCANA KERJA              PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	7
A.    Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
B.    Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu	12
C.    Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	94
D.    Review Terhadap Rancangn Awal RKPD	104
E.    Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	117
<b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	124
A.    Telaah terhadap Kebijakan Nasional	124
B.    Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	125
C.    Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	128
<b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKATDAERAH</b>	140
A.    Rencana Tindak Lanjut	140
<b>BAB V     PENUTUP</b>	152

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023
Tabel 2.2	Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023
Tabel 2.3	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, Wabah dan Bencana
Tabel 2.4	Pemenuhan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Tabel 2.5	Perbaikan Gizi Masyarakat
Tabel 2.6	Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil, Ibu Melahirkan, Bayi dan Balita serta Keluarga Berencana
Tabel 2.7	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah, Usia Produktif dan Lansia
Tabel 2.8	Upaya Kesehatan Pengembangan dan Inovasi
Tabel 2.9	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Pustu dan Pendukungnya
Tabel 2.10	Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Tabel 2.11	Peningkatan Administrasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
Tabel 2.12	Penguatan Sistem Informasi Kesehatan
Tabel 2.13	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Tabel 2.14	Pembenahan dan Penguatan Sistem Jaminan Nasional Kesehatan
Tabel 2.15	Peningkatan Akses dan Pemerataan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Tabel 2.16	Pengembangan Lingkungan Sehat
Tabel 2.17	Meningkatnya kesadaran dan kemandirian perilaku hidup bersih dan sehat
Tabel 2.18	Capaian Indikator Kinerja Berdasarkan Berdasarkan target SPM Tahun 2019-2029
Tabel 2.19	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bulan Januari s/d Desember Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023
Tabel 2.20	Analisa Dukungan Logistik dan Sumber Daya Manusia Dalam Mendukung SPM Tahun 2023
Tabel 2.21	Analisa Dukungan Anggaran Dalam Mendukung SPM Tahun 2023
Tabel TC.29	Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023

Tabel	T-C 30. (2.6 4)	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu
-------	--------------------------	--

Tabel 2.22	Berdasarkan Tugas & Fungsi Dinas Kesehatan Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam Ulu. Tahun 2021-2026	101
Tabel T-C.31. (2.66)	Review terhadap Rancangan Awal RJPD tahun 2025 Kabupaten Mahakam Ulu	106
Tabel 2.17.	Rekapitulasi Usulan Musrenbang Kecamatan Bidang Kesehatan Tahun 2025	118
Tabel T-C.32. (6.68)	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Mahakam Ulu	123
Tabel 3.1	Pokok-Pokok Visi Kabupaten Mahakam Ulu	125
Tabel 3.2	Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan	131
Tabel 3.3.	Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026	135
Tabel 3.4.	Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Tahun 2025	136
Tabel 3.5	Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025	138
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun	141

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Penjabaran yang lebih teknis dari Renstra Perangkat Daerah adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja PD. Renja PD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja PD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan PD yang diberikan kepada masyarakat penggunaannya.

Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Dinas Kesehatan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025. Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Dalam menyusun Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 sudah berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan 2021-2026 dengan mempertimbangkan arahan di dalam dokumen RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan pembangunan kesehatan dilaksanakan secara berkesinambungan serta dilakukan melalui proses perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terarah. Pedoman yang digunakan dalam proses perencanaan dan penganggaran tersebut adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Pemerintah Daerah (RKPD). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga

mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam Ulu, sebagai Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mempunyai kewajiban menyusun dokumen Renja sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Mahakam Ulu No. 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam Ulu. Renja tersebut juga sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Dinas

Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam Ulu serta perencanaan penyelenggaraan kegiatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam Ulu di tahun mendatang. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Keberadaan dokumen Rencana Kerja (Renja) tersebut disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, sehingga Renja merupakan satu kesatuan yang lengkap terkait dengan ketersediaan dokumen perencanaan untuk perencanaan pembangunan. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam Ulu (Renja Dinkes) Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam Ulu periode 2025 yang memuat arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Mahakam Ulu yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1(satu) tahun.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan pedoman perubahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan untuk melaksanakan kegiatan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesehatan. Dalam rangka upaya mencapai target sasaran pembangunan yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026, tentunya diperlukan perencanaan-perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dinas kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu melakukan penyusunan Renja Tahun 2023 yang berisi kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara langsung dengan penganggaran sesuai pagu indikatif berdasarkan kerangka kebijakan RKPD tahun 2023, yang bersumber dari APBD Kabupaten Mahakam Ulu.

## **B. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106 );
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
6. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 Indonesia Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
7. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Praktek Kedokteran;
8. Undang–Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana; Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Kepmendagri Nomor 050-7308 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

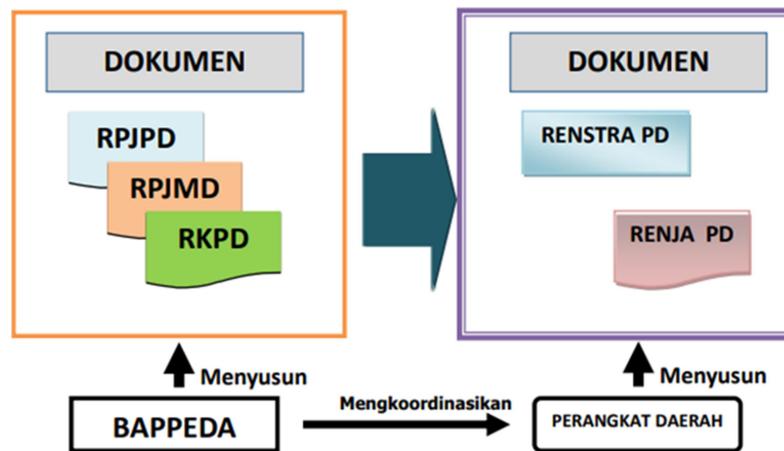
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 59 Tahun 2021, Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal Bidang Kesehatan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
27. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
29. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
30. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Intertarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dalam Negeri.
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

### **C. Hubungan Antara Dokumen**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian

target kinerja Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

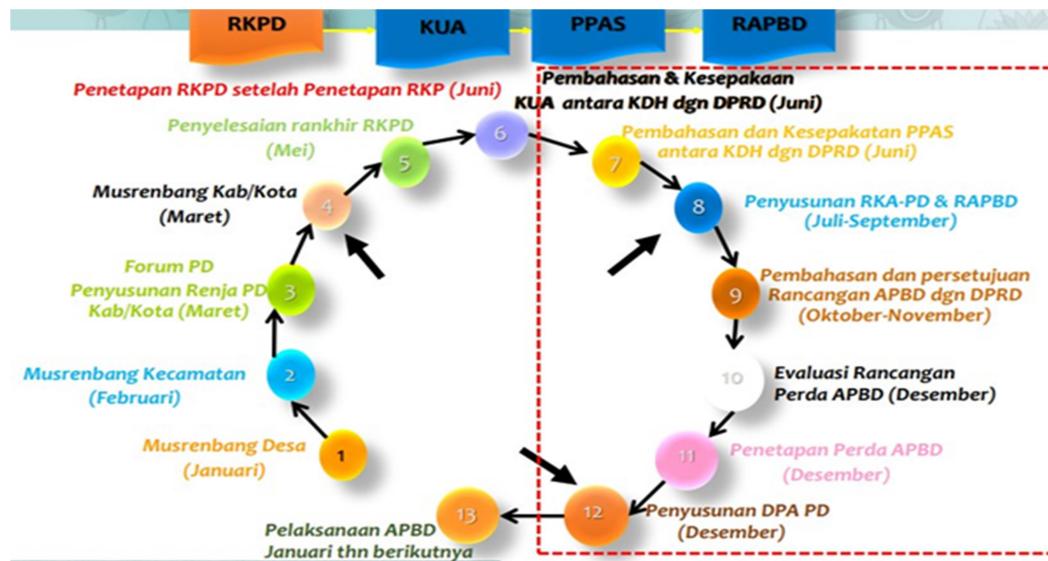
Pada Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, sedangkan Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan



Gambar 1. Hubungan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Dokumen Rencana Perangkat Daerah

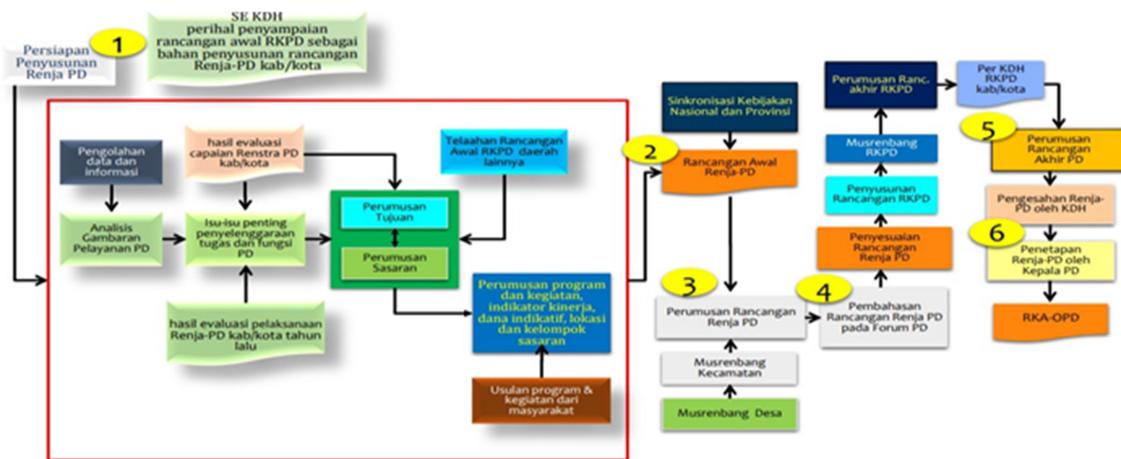
Sebagaimana Gambar 1. di atas Renstra PD dan Renja PD merupakan dokumen perencanaan pembangunan terkait urusan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Kedua dokumen ini disusun oleh Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan Bappelitbangda. Renstra PD dan Renja PD harus saling terkait. Renja PD merupakan penjabaran dari perencanaan yang sudah tertuang dalam Renstra PD. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Dalam menyusun Renja PD harus berpedoman pada Renstra PD dengan mempertimbangkan arahan di dalam dokumen RKPD.

Adapun keterkaitan antara Renja Dinas Kesehatan dengan proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada Gambar 2. berikut ini :



Gambar 2. Keterkaitan antara Renja Dinas Kesehatan dengan proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Adapun Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar 3. berikut ini :



Gambar 3. Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Tahapan dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan 2025 berdasarkan gambar di atas adalah sebagai berikut:

1. Persiapan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir;
6. Penetapan Peraturan Bupati Mahakam Ulu tentang Renja PD.



## **D. Maksud Dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Maksud penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2023 melalui perencanaan kinerja tahunan.

### **2. Tujuan**

Tujuan disusunnya Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 adalah menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional :

- a. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Kesehatan dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya di tahun 2023.
- b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2023 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan laporan kinerja.

## **1. Sistematika Penulisan**

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Perangkat Daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, hasil review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

#### **BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan sasaran Renja serta program dan kegiatan prioritas yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) sesuai dengan bidang urusan Perangkat Daerah.

#### **BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD dan RPJMD.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut

## BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN

### A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 Dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan merupakan proses sistematis yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Mahakam Ulu. Pengukuran Kinerja dilakukan pada Indikator tujuan, sasaran yang telah direncanakan dalam RENSTRA maupun RENJA, kemudian dibandingkan dengan realisasi dari pelaksanaan Program dalam rangka mencapai target indikator sasaran tersebut. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu meliputi realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Hasil pengukuran kinerja indikator Utama dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	72,4	74,72	103.20
		Persentase balita gizi buruk	0,15	0,28	186.67
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	7	11	157.14
		Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	0	0	0
		Prevalensi Penurunan stanting	18 %	7,52%	44,4%

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu, 2023*

*Keterangan:*

- a. Angka harapan hidup diperoleh berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023

Mencermati tabel diatas, semua indikator kinerja utama Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 pencapaiannya termasuk dalam kategori hijau muda. Dilihat dari ketercapaian dengan target yang direncanakan indikator kinerja utama mencapai target 100 %.

Pengukuran kinerja pada program tahun 2023 telah dilakukan dengan hasil bahwa sebagian besar sasaran sudah dapat mencapai target yang diharapkan, Hasil pengukuran kinerja indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.

## Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023

Tujuan /Sasaran/ / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat	Target Kinerja 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2022	Predikat	Predikat
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia							
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	positif	100	%	100	100	ST
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	positif	1	Dokumen	1	100	ST
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	positif	10	Dokumen	6	30	ST
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	positif	1	Dokumen	1	100	ST
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	positif	1	Laporan	1	100	ST
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	positif	2	Laporan	1	50	SR
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	positif	272	Orang	272	100	ST
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	positif	12	Dokumen	12	100	ST
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	positif	4	Laporan	4	100	ST
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya bahan logistik kantor	positif	5	Paket	5	100	ST
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	positif	10	Paket	10	100	ST
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	positif	4	Laporan	4	100	ST
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	positif	1	Dokumen	1	100	ST
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	positif	10	Unit	10	100	ST
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	positif	4	Laporan	4	100	ST
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	positif	12	Laporan	12	100	ST

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	positif	15	Unit	15	100	ST
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	positif	20	Unit	20	100	ST
	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	positif	10	Unit	10	100	ST
Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	positif	8	unit Kerja	6	75	T
	Prevalensi stunting	positif	18	%	18	100	ST
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kejadian Malaria	positif	0		0		
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	positif	7		7	100	ST
	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	positif	2		2	100	ST
	Angka usia harapan hidup	positif	72		72	100	ST
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	positif	70		70	100	ST
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	positif	41		41	100	ST
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	positif	91	%	91	100	ST
	Indeks Pembangunan Manusia	positif	70		70	100	ST
	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	positif	0	%	0		
	Persentase balita gizi buruk	positif	0		0		
	Rasio posyandu per satuan balita	positif	1		1	100	ST
	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	positif	1		1	100	ST
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	positif	0		0		
	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	positif	0		0		
	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	positif	2		2	100	ST
	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	positif	39	Unit	10	26	SR
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	positif	2	Unit	2	100	ST
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	positif	1	Unit	0	0	SR
	Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	positif	1	Unit	0	0	SR

	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	positif	10	Unit	10	100	ST
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	positif	8	Paket	8	100	ST
	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	positif	40	Unit	1	2.5	SR
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	positif	688	Orang	540	78	T
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	positif	549	Orang	415	75	S
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	positif	540	Orang	320	59	R
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	positif	1916	Orang	1750	91	ST
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	positif	237	Orang	0	0	SR
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	positif	50	Orang	0	0	SR
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	positif	1958	Orang	930	47	SR
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	positif	1058	Orang	0	0	SR
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	positif	110	Orang	96	87	T
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	positif	186	Orang	65	35	SR
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	positif	1187	Orang	987	83	T
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	positif	1	Dokumen	0	0	SR
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	positif	10	Dokumen	2	20	SR
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	positif	7	Dokumen	1	14	SR
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	positif	32	Dokumen	1	3	SR
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	positif	1	Dokumen	1	100	ST
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	positif	1	Dokumen	1	100	ST
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	positif	24	Dokumen	0	0	SR
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan NAPZA	positif	287	Orang	0	0	SR

	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	positif	48	Dokumen	1	2	SR
	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	positif	4	Dokumen	4	100	ST
	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	positif	22	Paket	0	0	SR
	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	positif	2	Dokumen	2	100	ST
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	positif	6	Dokumen	6	100	ST
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	positif	3	Dokumen	3	100	ST
	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	positif	6	Unit	6	100	ST
	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	positif	1	Laporan	0	0	SR
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	positif	60	Orang	0	0	SR
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	positif	100	Orang	50	50	SR
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	positif	5	Dokumen	5	100	ST
	Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	positif	10	Dokumen	1	10	SR
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	positif	8	Unit	8	100	ST
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas	positif	90	%	90	100	ST
	Cakupan tenaga kesehatan yang memenu	positif	50	%	50	100	ST
	Rasio dokter per satuan penduduk	positif	1		1	100	ST
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	positif	1		1	100	ST
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	positif	2	Dokumen	1	50	SR
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	positif	1	Dokumen	1	100	ST
	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	positif	100	Orang	0	0	SR
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	positif	1	Dokumen	1	100	ST
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	positif	10	Orang	10	100	ST
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami	positif	23		23	100	ST

KESEHATAN	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	positif	75	%	75	100	ST
	Cakupan rumah tangga sehat (PHBS Rumah Tangga)	positif	800		800	100	ST
	Indeks Pembangunan Manusia	positif	70		70	100	ST
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	positif	1	Dokumen	1	100	ST
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terseleenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	positif	1	Dokumen	1	100	ST
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	positif	2	Dokumen	1	50	SR
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate	positif	2		2	100	ST
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	positif	10	satuan Pendidikan	10	100	ST
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	positif	2	Unit	2	100	ST
	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	positif	1	Laporan	1	100	ST
	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	positif	1	Laporan	1	100	ST
	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	positif	1	Dokumen	0	0	SR
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Total Fertility Rate	positif	2		2	100	ST
	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan	positif	91	%	91	100	ST
	Ratio Akseptor KB	positif	75	%	75	100	ST
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	positif	5	Organisasi	5	100	ST
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	positif	1	Laporan	1	100	ST
	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	positif	0	Laporan	1		
	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	positif	1	Laporan	1	100	ST

	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	positif	6	Organisasi	6	100	ST
	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	positif	50	Orang	50	100	ST
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	positif	2	Laporan	2	100	ST
	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	positif	50	Orang	50	100	ST
	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	positif	1	Unit	1	100	ST
	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	positif	1	Laporan	1	100	ST
	Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	positif	5	Laporan	5	100	ST
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	positif	1	Dokumen	0	0	SR
	Terlaksananya Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	positif	10	Kampung	10	100	ST
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		positif	350		350	100	ST
	Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	positif	250	Kelompok	250	100	ST
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	positif	1	Unit	1	100	ST
	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	positif	1	Laporan	1	100	ST
	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor	positif	150	Orang	150	100	ST
	Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	positif	50	Orang	50	100	ST

Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	positif	1	Laporan	0	0	SR
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	positif	1	Laporan	0	0	SR
Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangsa (Indeks Pembangunan Keluarga)	positif	150	Orang	0	0	SR

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten MahakamUlu, 2023*

Dari tabel di atas, terdapat 16 (enam Belas) kegiatan yang terbagi dalam 78 (Tujuh Puluh Sembilan ) indikator. Pada tahun 2021, 32 (Tiga Puluh Dua) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 41,02% dari total indikator. Sementara itu, sebanyak 42 (Empat Puluh Dua) indikator atau sebesar 52,84% belum memenuhi target. Capaian yang tertinggi pada indikator kinerja dengan persentase sebesar 100% terdapat 18 (Delapan belas) indikator yaitu

## **B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dari data capaian Indikator Sasaran / program yang masuk dalam indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2023 di Kabupaten Mahakam Ulu yang dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja sasaran dan program yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut:

*Tabel 2.3*  
**Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023**  
**Berdasarkan Berdasarkan target SPMTahun 2021-2026**

No	Indikator SPM	Target Nasional	Target Dinkes	Penerima Layanan	Capaian %
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	578	470	81 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	551	484	88 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	525	477	91 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	3463	2595	75 %
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (kelas 1 dan 7)	100%	2550	1753	69 %
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (usia 15 - 59 Tahun)	100%	11030	10839	98 %
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (60 tahun Ke Atas)	100%	2429	1851	76 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	3384	2994	88 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Meletus (DM)	100%	1058	1058	100 %
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan Jiwa Berat ( ODGJ )	100%	146	146	100 %
11	Pelayanan Kesehatan TB	100%	513	471	92 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi HIV	100%	1695	1037	61 %

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa ada beberapa indikator yang dapat dicapat diatas 50%, Namun Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV 61 % menurun dari capaian tahun 2023, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (usia 15 - 59 Tahun) sudah meningkat menjadi 98%,

Tabel 2.3

Capaian Indikator Kinerja SPM dalam waktu lima tahun dari tahun 2019 s.d 2023

No	Indikator SPM	Capaian %				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	92	76	97	85	81
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	95	81	94	88	88
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	91	92	98	88	91
4	Pelayanan Kesehatan Balita	47	63	37	38	75
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (kelas 1 dan 7)	96	56	100	100	69
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (usia 15 - 59 Tahun)	53	83	48	75	98
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (60 tahun Ke Atas)	71	76	58	86	75
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	48	91	70	83	88
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Meletus (DM)	30	93	69	100	100
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	56	97	100	100	100
11	Pelayanan Kesehatan TB (Suspek )	79	63	31	100	92
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi HIV	63	79	39	75	61

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa beberapa capaian Indikator Pelayanan SPM, terjadi peningkatan dan penurunan dan ada juga yang menetap seperti : Pelayanan Kesehatan Balita 2 tahun berturut turut capaian dibawah 50% namun tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 75 %, dan yang mengalami penurunan pada 5 indikator yaitu : Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil tahun 2022 ada 85% menjadi 81% tahun 2023.

Tabel 2.4  
 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bulan Januari s/d Desember  
 Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 dan 2023

NO	Tahun Capaian					Kriteria	Permasalahan
	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	2022		2023			
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	607	85 %	100%	578	81 %	 <p>Adapun alasan tidak tercapainya diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pelayanan ANC sesuai standar</li> <li>2. Sarana prasarana penunjang pelayanan ANC Terpadu di FKTP belum sesuai standar</li> <li>3. Adanya kasus abortus pada ibu hamil sebanyak 4,64 %. Adanya ibu hamil pindah ke luar wilayah kabupaten sebesar 1,42 %</li> </ol>
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	581	83 %	100%	551	88 %	 <p>Cakupan belum mencapai 100% (sesuai standar SPM) dikarenakan di antaranya yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akses ke faskes masih menjadi kendala</li> <li>2. Masih adanya persalinan oleh non nakes (paraji) disebabkan Kemitraan paraji masih belum optimal</li> </ol> <p>Promosi kesehatan tentang persalinan di Fasilitas kesehatan masih belum optimal.</p>
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	553	88 %	100%	525	91 %	 <p>Kenaikan capaian disebabkan di antaranya yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas pelayanan pada bayi baru lahir sesuai standar dengan menggunakan MTBM</li> </ol> <p>Kesadaran ibu untuk pemeriksaan bayi baru lahir oleh petugas sudah baik.</p>

Pelayanan Kesehatan Balita	4.550	38 %	100%	3463	75 %	●	<p>Belum tercapainya target hal ini disebabkan di antaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator standar pelayanan kesehatan pada Balita cukup banyak dan rumit.</li> <li>2. Sarana dan alat pelayanan kesehatan pada balita khususnya Deteksi SDIDTK belum memenuhi jumlah dan standar pelayanan.</li> <li>3. Dukungan lintas sektor masih kurang.</li> <li>4. Pemberdayaan masyarakat tentang pentingnya pelayanan kesehatan pada Balita masih perlu ditingkatkan.</li> </ol>
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (kelas 1 dan 7)	1.896	100 %	100%	2550	69 %	●	<p>Belum mencapai target, hal ini dikarenakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pelayanan anak usia sekolah dan remaja.</li> <li>2. Petugas pelaksana pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar masih kurang.</li> <li>3. Pada saat pelaksanaan penjarangan pelayanan skrining kesehatan (kelas 1 dan 7) ada siswa yang tidak masuk sekolah dan tidak tersweeping sehingga tidak melaporkan dan menjadi miss opportunity.</li> <li>4. Alat-alat untuk skrining dan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar belum terpenuhi baik dari segi mutu maupun kuantitasnya.</li> <li>5. Belum optimalnya koordinasi Lintas Sektor terutama dengan Kemenag yang menyebabkan pencapaian realisasi belum mencapai 100%.</li> </ol>
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (usia 15 - 59 Tahun)	16.085	75 %	100%	11030	98 %	●	<p>Capaian kinerja belum mencapai target hal ini di karenakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggaran belum memadai karena skrining/ deteksi dini faktor resiko PTM pada usia produktif banyak jenisnya.</li> <li>2. Belum memaksimalkan klinik swasta baik dalam case finding maupun penatalaksanaan deteksi dini kasus faktor resiko terutama penyakit tidak menular.</li> <li>3. Koordinasi dengan lintas sektor masih belum maksimal terutama dengan sektor pendidikan baik pemerintah maupun swasta (lembaga pendidikan formal maupun non formal) untuk menjangkau usia sekolah dan remaja.</li> <li>4. Pemberdayaan masyarakat masih kurang optimal terutama dalam</li> <li>5. pemberdayaan UKBM.</li> </ol>
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (60	2.976	86 %	100%	2429	76 %	●	<p>Belum tercapainya target hal ini disebabkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pelayanan kesehatan pada lanjut usia</li> <li>2. Sarana dan prasarana (pemuahan untuk pemeriksaan sesuai setandar</li> </ol>

	tahun Ke Atas)							tidak terpenuhi sesuai jumlah sasaran). 3. Dukungan masyarakat / keluarga untuk pemeriksaan pada lansia belum baik.  Lansia yang masih bekerja sulit untuk menyesuaikan jadwal pelayanan posyandu lansia.
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	4.170	83 %	100%	3384	88 %		Belum tercapainya target hal ini disebabkan : 1. Belum optimalnya pelayanan kesehatan pada pasien hipertensi 2. Sarana dan prasarana (pemuahan untuk pemeriksaan sesuai setandar tidak terpenuhi sesuai jumlah sasaran). 3. Dukungan masyarakat / keluarga untuk pemeriksaan pada lansia belum baik.  Lansia yang masih bekerja sulit untuk menyesuaikan jadwal pelayanan posyandu lansia.
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Meletus (DM)	1.166	100 %	100%	1058	100 %		
	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	87	100 %	100%	146	100%		
	Pelayanan Kesehatan TB(Suspek )	513	100 %	100%	513	92 %		Belum mencapai target di karenakan ada beberapa kendala antara lain: a) Menolak untuk diobati b) Memilih pengobatan alternative c) Setelah pengobatan ke medis tidak ada perubah d) Kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat sekitar e) Belum semua kasus dikunjungi karena keterbatasan SDM (Programer yang merangkap tugas) f) Keluarga sudah bosan mengurus pasien g) Sudah di data tapi belum ada intervensi
	Pelayanan Kesehatan Orang	2.643	75 %	100%	1695	61 %		Pencapaian belum sesuai target yaitu 100%, selain karena tingginya target nasional yang ditetapkan dalam SPM Bidang Kesehatan, kegiatan ini

	dengan resiko terinfeksi HIV						<p>memiliki kendala, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Hotspot kelompok resiko masih belum diketahui sehingga penjangkauan suspect sulit dilakukan.</li> <li>b) WPS (wanita penjaja seks) tidak terkoordinir, sehingga sulit terpantau.</li> <li>c) Kebanyakan penderita berobat ke dokter praktek swasta.</li> <li>d) Belum optimalnya koordinasi lintas program dan lintas sektor.</li> <li>e) Kurangnya anggaran untuk penjangkauan ODH.</li> <li>f) Kualitas konseling yang menurun di layanan, sehingga cakupan menurun.</li> <li>g) Kurangnya pengetahuan dan kurangnya kesadaran dikelompok resiko tentang pentingnya pemeriksaan HIV.</li> </ul>
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--

Keterangan:

-  Cakupanpelaporan SPM Puskesmas  $\geq 50 - 100\%$
-  Cakupanpelaporan SPM Puskesmas  $\geq 25\% - 49,99\%$
-  Cakupanpelaporan SPM Puskesmas  $< 25\%$

Tabel 2.5 Analisa Dukungan Logistik dan Sumber Daya Manusia  
Dalam Mendukung SPM Tahun 2023

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)			(4)
	<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>	<b>BELUM TUNTAS</b>			0.00%
<b>1 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</b>				<b>82.72%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>65.05%</b>
			<b>Triwulan IV</b>		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	578	470	108	<b>81.31</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>17.66%</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</b>	88.32%
	1 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	578	470	108	<b>81.31</b>
	2 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	578	470	108	<b>81.31</b>
	3 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	578	470	108	<b>81.31</b>
	4 . Tablet tambah darah	52020	42300	9720	<b>81.31</b>
	5 . Kartu ibu/rekam medis ibu	578	470	d	<b>81.31</b>
	6 . Dokter/dokter spesialis kebidanan	6	6	0	<b>100.00</b>
	7 . Bidan	6	6	0	<b>100.00</b>
	8 . Perawat	6	6	0	<b>100.00</b>
<b>2 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</b>				<b>89.06%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>70.27%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	551	484	67	<b>87.84</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>18.78%</b>

	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</b>	93.92%
	1 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	551	484	67	87.84
	2 . Formulir Partograf	551	484	67	87.84
	3 . Kartu ibu (rekam medis)	551	484	67	87.84
	4 . Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	6	6	0	100.00
	5 . Bidan	6	6	0	100.00
	6 . Perawat	6	6	0	100.00
<b>3 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>			18.93%	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>0.15%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	525	477	48	90.86
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>			18.78%	
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</b>	93.90%
	1 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	525	477	48	90.86
	2 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	525	477	48	90.86
	3 . Vaksin Hepatitis B0	525	477	48	90.86
	4 . Salep/tetes mata antibiotik	525	477	48	90.86
	5 . Vitamin K1 injeksi	525	477	48	90.86
	6 . Formulir bayi baru lahir	525	477	48	90.86
	7 . Dokter/dokter spesialis Anak	6	6	0	100.00
	8 . Bidan	6	6	0	100.00
	9 . Perawat	6	6	0	100.00
<b>4 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Balita</b>			76.94%	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>59.95%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	3,463	2,595	Rp 868	74.94
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>			16.99%	
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</b>	84.96%
	1 . Peralatan Anafilaktik	3,463	2,595	868	74.94

2 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	3,463	2,595	868	74.94
3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	3,463	2,595	868	74.94
4 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	3,463	2,595	868	74.94
5 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	10389	7,785	2,604	74.94
6 . Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	3,463	2,595	868	74.94
7 . Vitamin A Biru	3,463	2,595	868	74.94
8 . Vitamin A Merah	6926	5,190	1736	74.94
9 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	3,463	2,595	868	74.94
10 . Bidan	6	6	0	100.00
11 . Dokter	6	6	0	100.00
12 . Perawat	6	6	0	100.00
13 . Ahli Gizi	2	2	0	100.00
14 . Guru PAUD	10	10	0	100.00
15 . Kader Kesehatan	30	30	0	100.00
<b>5 . Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar</b>			<b>72.91%</b>	
<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>55.47%</b>
<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	<b>2,550</b>	<b>1768</b>	<b>782</b>	<b>69.33</b>
<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>			<b>17.44%</b>	
<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</b>	<b>87.22%</b>
1 . Kuesioner skrining kesehatan	2,550	1768	782	69.33
2 . Buku pemantauan kesehatan	2,550	1768	782	69.33
3 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	2,550	1768	782	69.33
4 . Buku raport kesehatanku	2,550	1768	782	69.33
5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	2,550	1768	782	69.33
6 . Dokter/Dokter gigi	6	6	0	100.00
7 . Bidan	6	6	0	100.00
8 . Perawat	6	6	0	100.00

	9 . Ahli Gizi	6	6	0	100.00
	10 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	2	2	0	100.00
	11 . Guru	6	6	0	100.00
	12 . Kader Kesehatan	30	30	0	100.00
<b>6 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif</b>				<b>98.50%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>78.61%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	11,030	10,839	191	98.27
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>19.88%</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</b>	<b>99.42%</b>
	1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	11,030	10,839	191	98.27
	2 . Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	11,030	10,839	191	98.27
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	11,030	10,839	191	98.27
	4 . Perawat	6	6	0	100.00
	5 . Dokter	6	6	0	100.00
	6 . Bidan	6	6	0	100.00
	7 . Ahli Gizi	2	2	0	100.00
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	6	6	0	100.00
	9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih	30	30	0	100.00
<b>7 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</b>				<b>79.91%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>60.96%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	2,429	1,851	578	76.20
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>18.94%</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</b>	<b>94.71%</b>
	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	2,429	1,851	578	76.20
	2 . Buku kesehatan lansia	2,429	1,851	578	76.20

3 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	6	6	0	100.00
4 . Dokter	6	6	0	100.00
5 . Bidan	6	6	0	100.00
6 . Perawat	6	6	0	100.00
7 . Ahli Gizi	2	2	0	100.00
8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	6	6	0	100.00
9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih	30	30	0	100.00
<b>8 . Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>				90.12%
<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>70.78%</b>
<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	3,384	2,994	390	88.48
<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				19.34%
<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</b>	96.71%
1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	3,384	2,994	390	88.48
2 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	3,384	2,994	390	88.48
3 . Tensimeter	6	6	0	100.00
4 . Dokter	6	6	0	100.00
5 . Bidan	6	6	0	100.00
6 . Perawat	6	6	0	100.00
7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	6	6	0	100.00
<b>9 . Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</b>				100.00%
<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00%</b>
<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	1,058	1,058	-	100.00
<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				20.00%
<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</b>	100.00%

	1 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	1,058	1,058	0	100.00
	2 . Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	1,058	1,058	0	100.00
	3 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	1,058	1,058	0	100.00
	4 . Dokter	6	6	0	100.00
	5 . Bidan	6	6	0	100.00
	6 . Perawat	6	6	0	100.00
	7 . Ahli Gizi	2	2	0	100.00
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	6	6	0	100.00
<b>10 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat</b>				100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	146	146	0	100.00
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>20.00%</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</b>	<b>100.00%</b>
	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	146	146	0	100.00
	2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi	146	146	0	100.00
	3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	146	146	0	100.00
	4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	146	146	0	100.00
	5 . Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	6	6	0	100.00
<b>11 .</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</b>				92.57%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>73.45%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	513	471	42	91.81
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>19.12%</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>	<b>Jumlah Mutu Barang /</b>	<b>Jumlah Mutu Barang /</b>	<b>Jumlah Mutu Barang /</b>	<b>95.59%</b>

		Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	
	1 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	513	471	42	91.81
	2 . Catridge tes cepat molekuler	513	471	42	91.81
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan	513	471	42	91.81
	4 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	513	471	42	91.81
	5 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	513	471	42	91.81
	6 . Reagen Zn TB	513	471	42	91.81
	7 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	513	471	42	91.81
	8 . Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	6	6	0	100.00
	9 . Penata Rontgen	6	6	0	100.00
	10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	18	18	0	100.00
	11 . Tenaga kesehatan masyarakat	6	6	0	100.00
	12 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	6	6	0	100.00
	13 . Perawat	6	6	0	100.00
12 .	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)</b>				66.61%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>	<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>48.94%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	1,695	1,037	658	61.18
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				17.67%
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia</b>	88.35%
	1 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	1,695	1,037	658	61.18
	2 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	1,695	1,037	658	61.18
	3 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	6	6	0	100.00
	4 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	1,695	1,037	658	61.18

5 . Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	5	5	0	100.00
6 . Perawat	6	6	0	100.00
7 . Bidan	6	6	0	100.00
8 . Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	6	6	0	100.00
9 . Tenaga kesehatan masyarakat	6	6	0	100.00
10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	6	6	0	100.00

Ujoh Bilang, 23 Januari 2023  
Mengetahui,

Kepala Dinas Kesehatan P2KB

dr. Retronela Tugan, M.Kes  
NIP. 19780220 201001 2 009

Tabel 2.6 Analisa Dukungan Anggaran Dalam Mendukung SPM Tahun 2023  
**Evaluasi realisasi anggaran per- Indikator SPM**  
**Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023**

No.	Indikator	Total anggaran	Realisasi				Total realisasi	Sisa Anggaran	Keterangan
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
<b>Indikator SPM</b>									
<b>A</b>	<b>PELAYANAN KESEHATAN DASAR</b>								
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	520,293,000			71,311,000	304,537,755	<b>304,537,755</b>	215,755,245	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	175,090,000			48,503,820	162,223,820	<b>162,223,820</b>	12,866,180	

3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	109,435,500				98,110,000	<b>98,110,000</b>	11,325,500
4	Pelayanan Kesehatan Balita	220,354,000			101,230,000	129,800,000	<b>129,800,000</b>	90,554,000
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (kelas 1 dan 7)	170,580,000					-	170,580,000
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (usia 15 - 59 Tahun)	82,560,000					-	82,560,000
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (60 tahun Ke Atas)	156,931,000			26,332,000	29,921,000	<b>29,921,000</b>	127,010,000
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						-	-
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Meletus (DM)	17,388,000			17,388,000		<b>17,388,000</b>	-
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	167,696,000			103,956,000		<b>103,956,000</b>	63,740,000
11	Pelayanan Kesehatan TB	96,822,400			31,120,000	53,462,400	<b>53,462,400</b>	43,360,000
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi HIV	67,458,200			30,240,000	35,240,000	<b>35,240,000</b>	32,218,200
		<b>1,784,608,100</b>	-	-	<b>430,080,820.00</b>	<b>813,294,975.00</b>	<b>934,638,975.00</b>	<b>849,969,125.00</b>

Dalam menyesuaikan program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dimutakhirkan dalam Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah. Maka terdapat beberapa perubahan yang signifikan dalam mengkategorikan kegiatan sehingga dilakukan pemetaan (mapping) untuk mendapatkan kegiatan yang sepadan dengan sub kegiatan yang tersedia.

Hal ini selanjutnya berhubungan dengan perubahan indikator yang diatur dalam Pemandagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Atas dasar perubahan tersebut, berikut adalah hasil analisis perubahan indikator pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026:

Tabel TC.2.7  
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah  
Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana Kabupaten Mahakam Ulu  
Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun Lalu ( 2022 )		Target Kinerja Dan Anggaran Tahun Berjalan (2023) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2021 s/d 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K (%)	RP	K (%)	RP	K (%)	RP	I		II		III		IV		RP	K	RP	K	RP	K	
										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100%		(15)
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Presentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Dengan Baik	100	96.329.474.469	94,68	69.033.214.904	100	77.201.159.979	11,84	9.142.333.492	36,82	28.422.265.169	12,09	9.335.443.615	32,35	24.971.403.135	71.871.445.411	93,10	140.904.660.315,00	187,7745228	146,27	187,77	DINKES P2KB
		<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		100	542.769.486	99,82	281.268.567	100	543.192.000	2,81	15.283.600	40,76	221.399.623	-	0	12,74	69.179.489	305.862.712	56,31	587.131.279,00	156,13	108,17	156,13	DINKES P2KB
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat daerah	100	146.769.486	99,71	126.188.100	100	377.295.000	-	0	27,09	102.204.623	-	0	17,33	65.390.489	167.595.112	44,42	293.783.212,00	144,13	200,17	144,13	DINKES P2KB
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	231.000.000	99,57	86.855.467	100	87.232.000	17,52	15.283.600	46,79	40.820.000	0	0	4,34	3.789.000	59.892.600	68,66	146.748.067,00	168,23	63,53	168,23	DINKES P2KB

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	77.000.000	100,00	65.115.000	100	42.465.000	0	0	100	42.375.000	0	0	0	42.375.000	99,79	107.490.000,00	199,79	139,60	199,79	DINKES P2KB	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	88.000.000	100,00	3.110.000	100	36.200.000	0	0	99,45	36.000.000	0	0	0	36.000.000	99,45	39.110.000,00	199,45	44,44	199,45	DINKES P2KB	
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>100</b>	<b>36.087.738.760</b>	<b>92,13</b>	<b>30.732.216.260</b>	<b>100</b>	<b>36.145.057.379</b>	<b>7,60</b>	<b>2.746.053.542</b>	<b>39,55</b>	<b>14.294.039.918</b>	<b>10,62</b>	<b>3.839.987.399</b>	<b>34,06</b>	<b>12.310.052.754</b>	<b>33.190.133.613</b>	<b>91,82</b>	<b>63.922.349.873,00</b>	<b>183,95</b>	<b>177,13</b>	<b>183,95</b>	<b>DINKES P2KB</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	34.666.643.332	92,25	29.830.411.260	100	35.187.542.379	7,80	2.746.053.542	40,19	14.142.029.918	10,91	3.839.987.399	33,21	11.687.527.754	32.415.598.613	92,12	62.246.009.873,00	184,37	179,56	184,37	DINKES P2KB
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	1.289.095.428	77,32	767.660.000	100	885.000.000	0	0	17,18	152.010.000	0	64,34	569.430.000	721.440.000	81,52	1.489.100.000,00	158,84	115,52	158,84	DINKES P2KB	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	100	72.000.000	98,96	47.640.000	100	19.420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	47.640.000,00	98,96	66,17	98,96	DINKES P2KB	
																	<b>82</b>							

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100	60.000.000	99,98	86.505.000	100	53.095.000	0	0-	0-	0	100,00	53.095.000	53.095.000	100,00	139.600.000,00	199,98	232,67	199,98	DINKES P2KB			
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																									
				100	1.061.184.677	94,11	1.023.425.386	100	1.287.610.400	18,62	239.721.100	14,25	183.544.178	1,25	16.047.000	64,65	832.501.036	1.271.813.314	98,77	2.295.238.700,00	192,88	216,29	192,88	DINKES P2KB	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	862.000.000	96,18	638.135.060	100	316.845.400	54,95	174.116.300	0	5,06	16.047.000	39,51	125.185.000	315.348.300	99,53	953.483.360,00	195,71	110,61	195,71	DINKES P2KB	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	92.000.000	98,40	29.800.000	100	24.815.000	0	0	48	11.800.000	0	51,82	12.860.000	24.660.000	99,38	54.460.000,00	197,78	59,20	197,78	DINKES P2KB	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	107.184.677	87,74	355.490.326	100	945.950.000	6,94	65.604.800	18,16	171.744.178	0	73,41	694.456.036	931.805.014	98,50	1.287.295.340,00	186,24	1.201,01	186,24	DINKES P2KB	
			Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	79.232.000	0,00	-	100	124.713.000	0,00	0	0,00	0	0	100,00	124.713.000	124.713.000	100,00	124.713.000,00	100,00	157,40	100,00	DINKES P2KB	
2			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	57.665.488,00	93,82	36.460.141,824	100	38.176.080,00	15,81	6.034.302,250	225,63	13.615.456,850	39,74	5.410.701,00	44,65	10.923.766,950	35.984.227,050	94,26	72.444.368.874,00	188,07	125,63	188,07	DINKES P2KB

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	196.488.000	90,56	46.927.500	100	105.700.000	15,09	15.950.000	17,94	18.961.200	4	4.292.400	60,77	64.231.000	103.434.600	97,86	150.362.100,00	188,42	76,52	188,42	DINKES P2KB
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	57.469.000,00	97,07	36.413.214,324	100	38.070.380,000	15,81	6.018.352,250	35,71	13.596.495,650	14,20	5.406.408,600	28,52	10.859.535,950	35.880.792,450	94,25	72.294.006.774,00	191,32	125,80	191,32	DINKES P2KB
3	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		100	<b>182.326.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>2.381.300,294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>52.550.000</b>	<b>2001</b>	<b>1.051.512,880</b>	<b>51,98</b>	<b>1.237.685,610</b>	<b>2.341.748,490</b>	<b>98,34</b>	<b>2.341.748,490,00</b>	<b>98,34</b>	<b>1.284,37</b>	<b>98,34</b>	<b>DINKES P2KB</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	182.326.000	0,00	-	100	2.381.300,294	0	0	2,21	52.550.000	44,16	1.051.512,880	51,98	1.237.685,610	2.341.748,490	98,34	2.341.748,490,00	98,34	1.284,37	98,34	DINKES P2KB
3	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		100	<b>597.293.546</b>	<b>89,37</b>	<b>380.115.557</b>	<b>100</b>	<b>724.867.000</b>	<b>15</b>	<b>106.973,000</b>	<b>50</b>	<b>53.444.600</b>	<b>129</b>	<b>68.708,216</b>	<b>73,59</b>	<b>515.604,506</b>	<b>744.730,322</b>	<b>102,74</b>	<b>1.124.845,879,00</b>	<b>192,11</b>	<b>188,32</b>	<b>192,11</b>	<b>DINKES P2KB</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100	388.363.546	72,08	148.956.300	100	469.806.000	3	14.450.000	11,01	51.744.600	12,70	59.683.216	63,23	297.070,485	422.948,301	90,03	571.904.601,00	162,11	147,26	162,11	DINKES P2KB
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	107.950.000	97,11	42.059.257	100	73.290.000	12,30	9.015.000	2,32	1.700.000	12,31	9.025.000	62,53	45.830.000	65.570.000	89,47	107.629.257,00	186,58	99,70	186,58	DINKES P2KB
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100	100.980.000	98,92	189.100.000	100	181.771.000	100	83.508.000	0,00	0	0,00	0	95,01	172.704,021	256.212,021	140,95	445.312.021,00	239,87	440,99	239,87	DINKES P2KB
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																					229,32	196,19	
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun Lalu ( 2022 )		Target Kinerja Dan Anggaran Tahun Berjalan (2023) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2021 s/d 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K (%)	RP	K (%)	RP	K (%)	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP	K (%)	RP	RP	K	RP	K	RP	K	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12=8+9+10+11	13=6+12	14=13/5x100%	(15)										
				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12=8+9+10+11	13=6+12	14=13/5x100%	(15)							
4		Peningkatan Pelayanan BLUD		100	375.000.000	98,83	156.047.310	100	324.353.200	0	0	16,77	54.380.000	#DIV/0!	0	98,75	320.298.400	374.678.400	115,52	530.725.710,00	214,35	141,53	214,35	DINKES P2KB
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	375.000.000	98,83	156.047.310	100	324.353.200	0	0	16,77	54.380.000	-	0	98,75	320.298.400	374.678.400	115,52	530.725.710,00	214,35	141,53	214,35	DINKES P2KB
5	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		100	91.872.202.947	63,60	75.246.137.484	100	73.830.246.091	1,16	860.009.445	11,91	8.795.586.782	8,60	6.348.435.476	44,43	32.805.128.108	57.189.012.413	77,46	132.435.149.897,00	141,06	144,15	141,06	DINKES P2KB
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota		100	26.701.314.000	26,82	5.124.266.036	100	23.810.049.441	5,18	265.302.000	2,37	564.532.440	664,90	1.763.982.669	63,19	16.402.564.054	18.996.381.163	79,78	24.120.647.199,00	106,60	90,34	106,60	DINKES P2KB
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	100	4.000.000.000	0	-	100	7.380.685.000	0	0	1,31	96.506.000	-	0	70,03	5.168.737.617	5.265.243.617	71,34	5.265.243.617,00	71,34	131,63	71,34	DINKES P2KB
		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah	1	0	0,00	-	100	8.271.100.000	1,32	108.862.000	0,96	79.670.000	9,01	744.955.000	62,78	5.192.265.157	6.125.752.157	74,06	6.125.752.157,00	74,06	0,00	7.406,21	DINKES P2KB

		Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000																					
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	100	350.000.000	0	0	100	88.360.000	0	0	0,00	0	0	0	99,56	87.970.000	87.970.000	99,56	87.970.000,00	99,56	25,13	99,56	DINKES P2KB
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	100	20.814.564.000	83,45	4.172.396.786	100	5.216.739.000	1,73	90.400.000	4,75	247.908.890	0	0	87,28	4.552.938.530	4.891.247.420	93,76	9.063.644.206,00	177,21	43,54	177,21	DINKES P2KB
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	100	1.500.000.000	77,46	951.869.250	100	2.663.588.640	2,48	66.040.000	5,27	140.447.550	38	1.019.027.669	52,06	1.386.575.948	2.612.091.167	98,07	3.563.960.417,00	175,53	237,60	175,53	DINKES P2KB
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya Kegiatan Pembinaan Desa Siaga Aktif	100	36.750.000	0,00	-	100	189.576.801	0	0-	-	0-	0	7,43	14.076.802	14.076.802	7,43	14.076.802,00	7,43	38,30	7,43	DINKES P2KB	
6	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota</b>		100	64.345.888.947	46,40	47.110.060.353	100,00	48.417.864.850	1,26	594.707.445	16,78	8.126.395.385	770,88	4.584.452.807	288,26	23.425.227.407	36.730.783.044	57,57	83.840.843.397	103,97	986.225.399,24	484,34	DINKES P2KB
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	385.000.000	48,25	8.395.462.299	100	520.293.000	0,00	0	13,71	71.311.000	-	0	44,83	233.226.755	304.537.755	58,53	8.700.000.054,00	106,78	2.259,74	106,78	DINKES P2KB
	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan	100	235.000.000	0,00	-	100	175.090.000	0,00	0	27,70	48.503.820	-	43.250.000	145,06	253.977.640	345.731.460	197,46	825.731.460,00	197,46	147,12	197,46	DINKES P2KB

	Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar																							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	70.000.000	72,04	100.410.500	100	109.435.500	0,00	0	0	0	0,00	0	89,65	98.110.000	98.110.000	89,65	198.520.500,00	161,69	283,60	161,69		DINKES P2KB	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	290.000.000	96,49	265.414.000	100	220.354.000	13,60	29.960.000	32,34	71.270.000	1,40	3.080.000	11,57	25.490.000	129.800.000	58,91	395.214.000,00	155,40	136,28	155,40		DINKES P2KB	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	600.000.000	0,00	-	100	170.580.000	0,00	-	0,00	0	0	0	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DINKES P2KB
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	537.000.000	0,00	-	100	82.560.000	0,00	-	0,00	0	0	0	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DINKES P2KB
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	370.000.000	82,24	42.143.600	100	156.931.000	0,00	0	0,00	0	14,73	23.116.000	4,34	6.805.000	29.921.000	19,07	72.064.600,00	101,31	19,48	101,31		DINKES P2KB	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	930.000.000	0,00	-	100	17.388.000	0,00	0	0,00	0	100,00	17.388.000	-	0	17.388.000	100,00	17.388.000,00	100,00	1,87	100,00		DINKES P2KB	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	100	282.000.000	100	192.630.000	100	167.696.000	0,00	0	0	0	62	103.956.000	-	0	103.956.000	61,99	296.586.000,00	161,99	105,17	161,99		DINKES P2KB	



	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	100	252.000.000	97,88	67.032.000	100	88.640.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	99,99	88.630.000	88.630.000	99,99	155.662.000,00	197,87	61,77	197,87	DINKES P2KB
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100	219.615.000	68,27	868.265.280	100	122.040.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	868.265.280,00	68,27	395,36	68,27	DINKES P2KB
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100	619.524.544	0,00	-	100	23.400.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DINKES P2KB
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	100	1.003.118.800	99,97	513.968.000	100	247.516.400	0,00	0	46,93	116.162.400	0,00	0	39,75	98.382.500	214.544.900	86,68	728.512.900,00	186,65	72,62	186,65	DINKES P2KB
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100	12.000.000,00	92,25	10.799.311.735	100	9.570.351.600	2,64	0	42,18	4.036.910.800	18,93	1.811.231.800	27,64	2.644.916.516	8.746.070.116	91,39	19.545.381.851,00	183,64	162,88	183,64	DINKES P2KB
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	3.000.000.000	0,00	-	100	2.575.938.100	7,79	0	24,24	624.482.000	5,63	144.918.042	34,53	889.437.116	1.859.387.158	72,18	1.859.387.158,00	72,18	61,98	72,18	DINKES P2KB
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang	100	48.315.300	0,00	-	100	4.400.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DINKES P2KB

	Rujukan/Nasional	Didistribusikan																						
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100	24.443.315.300	77,10	8.749.446.785	100	17.656.423.866	0,63	111.186.445	7,45	1.314.617.818	9,02	1.591.810.455	70,93	12.524.499.805	15.542.114.523	88,03	24.291.561.308,00	165,13	99,38	165,13	DINKES P2KB	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	16.000.000.000	60,48	9.428.222.190	100	11.484.910.986	0,00	0	13,88	1.594.526.990	4,69	539.188.169	35,00	4.019.221.165	6.152.936.324	53,57	15.581.158.514,00	114,05	97,38	114,05	DINKES P2KB	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	950.000.000	98,66	5.313.484.234	100	1.964.547.778	0,00	0	7,49	147.225.857	2,71	53.183.689	55,20	1.084.508.010	1.284.917.556	65,41	6.598.401.790,00	164,07	694,57	164,07	DINKES P2KB	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	100	317.000.000	0,00	-	100	786.226.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	88,09	692.625.600	692.625.600	88,09	692.625.600,00	88,09	218,49	88,09	DINKES P2KB	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	1	0,00	-	100	16.250.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DINKES P2KB
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang Yang Dilayani Kesehatan Malaria	1	1	0,00	-	100	239.700.000	0,00	0	0,00	0	92,61	221.990.652	-	0	221.990.652	92,61	221.990.652,00	92,61	22.199.065.200,00	9.261,19	9.261,19	DINKES P2KB
7	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Secara Terintegrasi</b>		<b>100</b>	<b>305.000.000</b>	<b>99</b>	<b>221.837.752</b>	<b>100</b>	<b>1.204.595.500</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>8,69</b>	<b>104.658.957</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1.078.063.660</b>	<b>1.182.722.617</b>	<b>98,18</b>	<b>1.404.560.369,00</b>	<b>197,43</b>	<b>460,51</b>	<b>197,43</b>	<b>DINKES P2KB</b>	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100	260.000.000	98,89	198.587.252	100	155.345.000	-	0	48,66	75.598.457	-	0	51,15	79.463.660	155.062.117	99,82	353.649.369,00	198,71	136,02	198,71	DINKES P2KB	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100	45.000.000	99,61	23.250.500	100	1.049.250.500	-0	0	2,77	29.060.500	-	0	95,17	998.600.000	1.027.660.500	97,94	1.050.911.000,00	197,55	2.335,36	197,55	DINKES P2KB	
																		<b>82</b>						

8		<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota</b>	100	520.000.000	81,94	22.789.973.343	100	397.736.300	-	0-	0-	0	70,18	279.125.589	279.125.589	70,18	23.069.098.932,00	152,12	4.436,37	152,12	DINKES P2KB		
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	100	520.000.000	99,92	22.789.973.343	100	397.736.300	-	0-	0-	0	70,18	279.125.589	279.125.589	70,18	23.069.098.932,00	170,10	4.436,37	170,10	DINKES P2KB		
9	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	100	290,97	99,97	99.816.000	100	292.929.400	2,71	7.935.400	17,53	51.342.600	48,88	143.187.184	371,87	1.089.327.436	97.462.600	33,27	197.278.600,00	124,24	9.863.930.000,00	124,24	DINKES P2KB
		<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	100	181,94	99,97	23.316.000	100	87.390.000	-	0-	0	-	0	52,77	46.120.000	46.120.000	52,77	69.436.000,00	134,71	6.943.600.000,00	134,71	DINKES P2KB	
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1	1	100	23.316.000	100	87.390.000	-	0-	0	-	0	52,77	46.120.000	46.120.000	52,77	69.436.000,00	152,77	6.943.600.000,00	15.277,49	DINKES P2KB	
		<b>Perencanaan Kebutuhan Dan Pemandayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	100	380.000.000	81,94	115.471.600	100	596.039.000	2,14	12.774.984	3,02	18.009.600	-	0	83,64	498.543.718	529.328.302	88,81	644.799.902,00	170,75	169,68	170,75	DINKES P2KB
		Perencanaan dan Distribusi Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	380.000.000	83,07	115.471.600	100	596.039.000	2,14	12.774.984	3,02	18.009.600	-	0	83,64	498.543.718	529.328.302	88,81	644.799.902,00	171,88	169,68	171,88	DINKES P2KB
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	336.000.000	0,00	-	100	28.360.000	-	0-	0	-	0	13,15	3.730.000	3.730.000	13,15	3.730.000,00	13,15	1,11	13,15	DINKES P2KB	

		Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																					
10		<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	100	1.687.000.000	81,94	69.497.600	100	540.971.000	0-	0-	0	-	0	70,75	382.740.442	382.740.442	70,75	452.238.042,00	152,69	26,81	152,69	DINKES P2KB	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100	1.687.000.000	74,96	69.497.600	100	540.971.000	0-	0-	0	-	0	70,75	382.740.442	382.740.442	70,75	452.238.042,00	145,71	26,81	145,71	DINKES P2KB	
11		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	100	1.134.528.438	67,61	767022000	100	462.417.600	0	11,79	54.536.000	-	0	78,97	365.174.000	356.809.800	77,16	1.123.831.800,00	144,77	99,06	144,77	DINKES P2KB	
		<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	100	899.528.438	46,16	415237100	100	270.854.300	0	20,13	54.536.000	-	0	67,41	182.587.000	237.123.000	87,55	652.360.100,00	133,71	72,52	133,71	DINKES P2KB	
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100	899.528.438	96,24	415.237.100	100	270.854.300	0	0	20,13	54.536.000	-	0	67,41	182.587.000	237.123.000	87,55	652.360.100,00	183,79	72,52	183,79	DINKES P2KB
12		<b>Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	100	235.000.000	149,70	351.784.900	100	191.563.300	0-	0-	0	-	0	62,48	119.686.800	119.686.800	62,48	471.471.700,00	212,17	200,63	212,17	DINKES P2KB	

	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100	235.000.000	99,91	351.784.900	100	191.563.300	0	0	0,00	0-	0	62,48	119.686.800	119.686.800	62,48	471.471.700,00	162,39	200,63	162,39	DINKES P2KB	
	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat daerah Kabupaten/Kotya</b>		100	180.000.000	-	-	100	469.348.000	0	0	0-	0-	0	90,17	423.220.078	423.220.078	90,17	423.220.078,00	90,17	235,12	90,17	DINKES P2KB	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100	180.000.000	0,00	-	100	469.348.000	0	0	0,00	0-	0	90,17	423.220.078	423.220.078	90,17	423.220.078,00	90,17	235,12	90,17	DINKES P2KB	
13	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	100	424.279.312	38,79	164.593.600	100	1.281.355.300	0	0	13,16	168.593.000	22,35	286.353.000	32,90	421.539.462	539.299.462	42,09	703.893.062,00	80,88	165,90	80,88	DINKES P2KB
		<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	100	169.023.000	73,55	69.537.000	100	169.023.000	0	0	99,75	168.593.000	99,75	168.593.000	99,75	168.593.000	168.593.000	99,75	238.130.000,00	173,30	140,89	173,30	DINKES P2KB
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan	100	267.411.375	99,44	43.490.000	100	141.545.000	0	0	73,52	104.057.544	0,00	-	13,57	19.202.000	123.259.544	87,08	166.749.544,00	186,52	62,36	186,52	DINKES P2KB

	SLTP/MTS jalur Nonformal dan Informal	Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal																						
14	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>		100	255.256.312	79,94	95.056.600	100	1.112.332.300	0	0	0,00	0	10,59	117.760.000	22,74	252.946.462	370.706.462	33,33	465.763.062,00	113,27	182,47	113,27	DINKES P2KB	
	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	100	155.000.000	0,00	0	100	179.819.500	0	0	0,00	0	0,00	0	93,21	167.616.000	167.616.000	93	167.616.000,00	93,21	108,14	93,21	DINKES P2KB	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	100	255.256.312	0,00	0	100	64.200.000	1,35	866.000	58,04	37.260.000	0,00	0	39,10	25.100.000	63.226.000	98	63.226.000,00	98,48	24,77	98,48	DINKES P2KB	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1	1	0,00	0	100	38.400.000	0	0	0,00	0	0,00	0	100,00	38.400.000	38.400.000	100	38.400.000,00	100,00	3.840.000.000,00	10.000,00	DINKES P2KB	
	Pengolahan dan Pelaporan Data	Jumlah Dokumen Pengolahan dan	1	1	0,00	0	100	18.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	82	0,00	0,00	0,00	0,00	DINKES P2KB

	Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																					
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	100	255.256.312	68,34	95.056.600	100	1.112.332.300	0	0	0,00	0	10,59	117.760.000	22,74	252.946.462	370.706.462	33	465.763.062,00	101,67	182,47	101,67	DINKES P2KB
15	Memgkatnya Derajat Kesehatan	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	100	255.000.003	15,63	103.080.000	100	732.508.600	0	0	12,09	88.565.600	31,65	231.836.184	38,34	280.827.358	53.110.000	7,25	156.190.000,00	22,88	61,25	22,88	DINKES P2KB
		Penyuluhan, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	100	75.000.000	13,57	26.580.000	100	75.000.000	0	0	12,00	9.000.000	12,00	9.000.000	70,81	53.110.000	53.110.000	70,81	79.690.000,00	84,38	106,25	84,38	DINKES P2KB
		Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1	1	0,00	-	100	80.000.000	0	0-	0-	0	100,00	80.000.000	80.000.000	100,00	80.000.000,00	100,00	8.000.000.000,00	10.000,00	10.000,00	DINKES P2KB
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan	1	1	0,00	-	100	65.000.000	0	0-	0-	0	7,26	4.720.000	4.720.000	7,26	4.720.000,00	7,26	472.000.000,00	726,15	726,15	DINKES P2KB	

	Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	n, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																						
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		1	1	0,00	-	100	114.450.000	0	0	8,77	10.038.000	2,62	3.000.000	78,28	89.586.000	102.624.000	89,67	102.624.000,00	89,67	10.262.400.000,00	8.966,71	DINKES P2KB	
	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	100	454.293.030	81,59	138.635.000	100	299.822.600	0	0	8,33	24.986.800	2,29	6.854.000	64,33	192.867.800	224.708.600	74,95	363.343.600,00	156,54	79,98	156,54	DINKES P2KB	
16	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>		<b>100</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>87.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>71,26</b>	<b>62.000.000</b>	<b>62.000.000</b>	<b>71,26</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>71,26</b>	<b>3.100.000.000,00</b>	<b>71,26</b>	<b>DINKES P2KB</b>	
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan Oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1	1	0,00	-	100	62.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0	100,00	62.000.000	62.000.000	100,00	62.000.000,00	100,00	6.200.000.000,00	10.000,00	DINKES P2KB	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan	1	1	0,00	-	100	25.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0-	0	0	0	0,00	82	0,00	0,00	0,00	0,00	DINKES P2KB

	Pedesaan (IMP)	Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																					
16	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>		100	180.000.002	33,33	76.500.000	100	315.563.400	0	0	22,67	71.552.600	54,57	172.199.184	0	121.112.200	38,38	197.612.200,00	71,71	109,78	71,71	DINKES P2KB	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1	1	1,00	1	100	17.100.000	4,74	810.000	0,00	0	0,00	0	94,96	16.238.000	17.048.000	99,70	17.048.001,00	100,70	1.704.800.100,00	10.069,59	DINKES P2KB
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1		196,62	94.212.000	100	37.153.000	0	0	29,88	11.100.000	13,46	5.000.000	45,76	17.000.000	33.100.000	89,09	127.312.000,00	185,71	12.731.200.000,00	18.571,11	DINKES P2KB
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1	1	0,00	-	100	310.395.000	0	0	0,00	0	0,00	0	97,94	303.995.000	303.995.000	97,94	303.995.000,00	97,94	30.399.500.000,00	9.793,81	DINKES P2KB
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga	100	180.000.000	0,00	-	100	12.300.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DINKES P2KB

	Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk jaringan dan jejaringnya	Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																				
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	1	1100,00	76.500.000	100	205.539.400	3,86	7.935.400	24,98	51.342.600	70	143.187.184	0	51.342.600	24,98	127.842.600,00	124,98	12.784.260.000,00	12.497,94		DINKES P2KB
	Dukungan Operasional Pelayanan KB bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1	10,00	-	100	97.724.000	5,04	4.929.600	20,68	20.210.000	29,69	29.012.000	15,98	15.618.000	69.769.600	71,39	69.769.600,00	71,39	6.976.960.000,00	7.139,45	DINKES P2KB
17	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>		<b>100</b>	<b>10,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>341.945.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2,34</b>	<b>8.013.000</b>	<b>14,81</b>	<b>50.637.000</b>	<b>66,59</b>	<b>227.717.358</b>	<b>286.367.358</b>	<b>83,75</b>	<b>286.367.358,00</b>	<b>83,75</b>	<b>28.636.735.800,00</b>	<b>83,75</b>	<b>DINKES P2KB</b>

		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	1	1	0,00	-	100	341.945.200,00	0,00	0	2,34	8.013.000	14,81	50.637.000	66,59	227.717.358	286.367.358	83,75	286.367.358,00	83,75	28.636.735.800,00	8.374,66	DINKES P2KB
17	Berkurangnya Angka Kemiskinan	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>		100	533,70	293.495.400	100	1.404.741.000	17,23	242.054.600	5,00	70.262.000	16,88	237.103.500	78,61	1.104.292.500	1.387.496.600	98,77	1.680.992.000,00	132,47	33.619.840.000,00	132,47	DINKES P2KB	
		<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>		100	533,70	293.495.400	100	1.404.741.000	8,95	125.740.600	5,00	70.262.000	16,88	237.103.500	67,94	954.390.500	1.387.496.600	98,77	1.680.992.000,00	132,47	33.619.840.000,00	132,47	DINKES P2KB	
		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan	jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan	1	1	0,00	-	100	355.994.000	32,67	116.314.000	0,00	0	24,21	86.182.000	42,11	149.902.000	352.398.000	98,99	352.398.000,00	98,99	35.239.800.000,00	9.898,99	DINKES P2KB

	Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk																					
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	1	0,00	-	100	360.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	97,00	349.200.000	349.200.000	97,00	349.200.000,00	97,00	34.920.000.000,00	9.700,00	DINKES P2KB
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	1	81,80	228.587.400	100	313.237.500	3,01	9.426.600	22,43	70.262.000	19,45	60.921.500	55,00	172.295.000	312.905.100	99,89	541.492.500,00	181,69	54.149.250.000,00	18.169,39	DINKES P2KB

	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	1	0,00	-	100	60.509.500,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	59.121.500	59.121.500	97,71	59.121.500,00	97,71	5.912.150.000,00	9.770,61	DINKES P2KB	
	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	1	86,70	64.908.000	100	315.000.000,00	0,00	0	-	0	28,57	90.000.000	71,07	223.872.000	313.872.000	99,64	378.780.000,00	186,34	37.878.000.000,00	18.634,19	DINKES P2KB
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program								155.205.357.970	10.252.332.937	37.651.151.151	16.582.358.959	61.037.691.999											

Disusun

Ujoh Bilang, 21 Februari 2024

Kepala Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Mahakam Ulu



dr. Petronela Tugan, M.Kes  
NIP. 19780220 201001 2 009

Dievaluasi

Ujoh Bilang, .....  
Kepala Bappelitbangda  
Kabupaten Mahakam Ulu

**Tabel T-C.30. (2.8)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu**

SKPD : DINAS KESEHATAN KABUPATEN Mahakam Ulu

No.	SPM/Standar Nasional	IK K	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)
1.	Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Cakupan Puskesmas	Angka Kematian Ibu (AKI)	100%	100%	100%	100%	97%	<b>85</b>	81 %	100%	100%	
2.	Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Cakupan Puskesmas	Cakupan Pelayanan Nifas	100%	100%	100%	100%	94%	<b>88</b>	88 %	100%	100%	
3.	Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Cakupan Puskesmas	Angka Kematian Bayi (AKB)	100%	100%	100%	100%	98%	<b>88</b>	91 %	100%	100%	
4.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Cakupan Puskesmas	Cakupan Pelayanan Anak Balita	100%	100%	100%	100%	37%	<b>38</b>	75 %	100%	100%	
			Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100%	100%	100%	100%		<b>100</b>	69 %	100%	100%	
5.	Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan	Cakupan Puskesmas	Cakupan penjangkaran	100%	100%	100%	100%	100%	<b>75</b>	98 %	100%	100%	

	Pelayanan kesehatan sesuai standar		kesehatan siswa SD dan setingkat										
6.	Orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Cakupan Puskesmas	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	48%	<b>86</b>	76 %	100%	100%	
7.	Warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Cakupan Puskesmas	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	58%	<b>83</b>	88 %	100%	100%	
8.	Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan Puskesmas	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	70%	48 %	100 %	100%	100%	
9.	Penderita DM yang mendapatkan	Cakupan	Cakupan Desa/	100%	100%	100%	100%	69%	58 %	100%	100 %	100%	
										92 %			
										61 %			

	pelayanan kesehatan sesuai standar	Puskesmas	Kelurahan, mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam									
10.	ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Cakupan Puskesmas	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	
11.	Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai	Cakupan Puskesmas	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+)	100%	100%	100%	100%	31%	59%	100%	100%	
12.	Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Cakupan Puskesmas	Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi	100%	100%	100%	100%	39%	32%	100%	100%	

**Tabel 2.9**  
**REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN**

**SUMBER DANA**            **APBD / DAK**  
**TAHUN**                    **2023**  
**ANGGARAN**  
**LAPORAN**                **DESEMBER**  
**BULANAN**  
**SKPD / UNIT**            **DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KERJA**

Kode Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran	BOBO T (%)	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan			Sisa Anggaran	Keterangan
				Fisik (%)	Tertimbang g (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Tertimbang (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
<b>1 . 02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>									
<b>1 . 02 . 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>79.691.808.273,00</b>				<b>74.096.803.314,00</b>				
<b>1 . 02 . 01 . 2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>527.827.000,00</b>				<b>305.862.712,00</b>				
1 . 02 . 01 . 2.01 . 01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	377.295.000,00	0,23	44,42	0,10	167.595.112,00	44,42	0,10	209.699.888,00	
1 . 02 . 01 . 2.01 . 02	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	71.867.000,00	0,04	83,34	0,04	59.892.600,00	83,34	0,04	11.974.400,00	
1 . 02 . 01 . 2.01 . 06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	42.465.000,00	0,03	100,00	0,03	42.375.000,00	99,79	0,03	90.000,00	
1 . 02 . 01 . 2.01 . 07	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	36.200.000,00	0,02	100,00	0,02	36.000.000,00	99,45	0,02	200.000,00	
<b>1 . 02 . 01 . 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>36.145.057.379,00</b>				<b>33.103.795.978,00</b>				
1 . 02 . 01 . 2.02 . 01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	35.187.542.379,00	21,81	100,00	21,81	32.329.260.978,00	91,88	20,04	2.858.281.401,00	
1 . 02 . 01 . 2.02 . 02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	885.000.000,00	0,55	81,52	0,45	721.440.000,00	81,52	0,45	163.560.000,00	

1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.420.000,00	0,01	0,00	0,00	-	0,00	0,00	19.420.000,00
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	53.095.000,00	0,03	100,00	0,03	53.095.000,00	100,00	0,03	-
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.412.323.400,00</b>				<b>1.396.526.314,00</b>			
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	316.845.400,00	0,20	100,00	0,20	315.348.300,00	99,53	0,20	1.497.100,00
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.815.000,00	0,02	100,00	0,02	24.660.000,00	99,38	0,02	155.000,00
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	945.950.000,00	0,59	100,00	0,59	931.805.014,00	98,50	0,58	14.144.986,00
1.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	124.713.000,00	0,08	100,00	0,08	124.713.000,00	100,00	0,08	-
<b>1.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.381.300.294,00</b>				<b>2.341.748.490,00</b>			
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.381.300.294,00	1,48	100,00	1,48	2.341.748.490,00	98,34	1,45	39.551.804,00
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>38.176.080.000,00</b>				<b>35.965.349.098,00</b>			
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.700.000,00	0,07	100,00	0,07	103.434.600,00	97,86	0,06	2.265.400,00
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.070.380.000,00	23,60	100,00	23,60	35.861.914.498,00	94,20	22,23	2.208.465.502,00
<b>1.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>724.867.000,00</b>				<b>663.222.322,00</b>			
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	469.806.000,00	0,29	100,00	0,29	422.948.301,00	90,03	0,26	46.857.699,00
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.290.000,00	0,05	100,00	0,05	67.570.000,00	92,20	0,04	5.720.000,00
1.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	181.771.000,00	0,11	100,00	0,11	172.704.021,00	95,01	0,11	9.066.979,00
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>324.353.200,00</b>				<b>320.298.400,00</b>			
<b>1.02.01.2.10.</b>	<b>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</b>	<b>324.353.200,00</b>	<b>0,20</b>	<b>100,00</b>	<b>0,20</b>	<b>320.298.400,00</b>	<b>98,75</b>	<b>0,20</b>	<b>4.054.800,00</b>

01	BLUD									
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>74.542.821.255,00</b>				<b>56.533.367.184,00</b>				
1.02.02.2.01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>23.810.049.441,00</b>				<b>18.803.369.163,00</b>				
1.02.02.2.01.03	<i>Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>	7.380.685.000,00	4,58	68,72	3,14	5.072.231.617,00	68,72	3,14	2.308.453.383,00	
1.02.02.2.01.05	<i>Pengembangan Rumah Sakit</i>	8.271.100.000,00	5,13	74,06	3,80	6.125.752.157,00	74,06	3,80	2.145.347.843,00	
1.02.02.2.01.15	<i>Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi</i>	88.360.000,00	0,05	99,56	0,05	87.970.000,00	99,56	0,05	390.000,00	
1.02.02.2.01.16	<i>Pengadaan Obat, Vaksin</i>	5.216.739.000,00	3,23	100,00	3,23	4.891.247.420,00	93,76	3,03	325.491.580,00	
1.02.02.2.01.17	<i>Pengadaan Bahan Habis Pakai</i>	2.663.588.640,00	1,65	100,00	1,65	2.612.091.167,00	98,07	1,62	51.497.473,00	
1.02.02.2.01.20	<i>Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	189.576.801,00	0,12	7,43	0,01	14.076.802,00	7,43	0,01	175.499.999,00	
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>49.130.440.014,00</b>				<b>36.547.275.404,00</b>				
1.02.02.2.02.01	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</i>	520.293.000,00	0,32	58,53	0,19	304.537.755,00	58,53	0,19	215.755.245,00	
1.02.02.2.02.02	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</i>	175.090.000,00	0,11	100,00	0,11	162.223.820,00	92,65	0,10	12.866.180,00	
1.02.02.2.02.03	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</i>	109.435.500,00	0,07	89,65	0,06	98.110.000,00	89,65	0,06	11.325.500,00	
1.02.02.2.02.04	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</i>	220.354.000,00	0,14	58,91	0,08	129.800.000,00	58,91	0,08	90.554.000,00	
1.02.02.2.02.05	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar</i>	170.580.000,00	0,11	0,00	0,00	-	0,00	0,00	170.580.000,00	
1.02.02.2.02.06	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif</i>	82.560.000,00	0,05	0,00	0,00	-	0,00	0,00	82.560.000,00	
1.02.02.2.02.07	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</i>	156.931.000,00	0,10	19,07	0,02	29.921.000,00	19,07	0,02	127.010.000,00	
1.02.02.2.02.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan</i>	17.388.000,00	0,01	100,00	0,01	17.388.000,00	100,00	0,01	-	

09	<i>Penderita Diabetes Melitus</i>									
1 . 02 . 02 . 2.02 . 10	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat</i>	167.696.000,00	0,10	61,99	0,06	103.956.000,00	61,99	0,06	63.740.000,00	
1 . 02 . 02 . 2.02 . 11	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</i>	96.822.400,00	0,06	55,22	0,03	53.462.400,00	55,22	0,03	43.360.000,00	
1 . 02 . 02 . 2.02 . 12	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV</i>	67.458.200,00	0,04	54,26	0,02	35.240.000,00	52,24	0,02	32.218.200,00	
1 . 02 . 02 . 2.02 . 15	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>	595.615.120,00	0,37	15,07	0,06	89.782.000,00	15,07	0,06	505.833.120,00	
1 . 02 . 02 . 2.02 . 16	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olah Raga</i>	287.499.600,00	0,18	46,62	0,08	225.924.400,00	78,58	0,14	61.575.200,00	
1 . 02 . 02 . 2.02 . 17	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>	608.020.800,00	0,38	72,29	0,27	439.560.800,00	72,29	0,27	168.460.000,00	
1 . 02 . 02 . 2.02 . 18	<i>Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</i>	361.776.000,00	0,22	14,97	0,03	54.152.400,00	14,97	0,03	307.623.600,00	
1 . 02 . 02 . 2.02 . 19	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya</i>	88.640.000,00	0,05	99,99	0,05	88.630.000,00	99,99	0,05	10.000,00	
1 . 02 . 02 . 2.02 . 20	<i>Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>	122.040.000,00	0,08	0,00	0,00	-	0,00	0,00	122.040.000,00	
1 . 02 . 02 . 2.02 . 22	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA</i>	23.400.000,00	0,01	0,00	0,00	-	0,00	0,00	23.400.000,00	
1 . 02 . 02 . 2.02 . 23	<i>Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus</i>	247.516.400,00	0,15	86,68	0,13	214.544.900,00	86,68	0,13	32.971.500,00	
1 . 02 . 02 . 2.02 . 25	<i>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>	2.575.938.100,00	1,60	72,18	1,15	1.859.387.158,00	72,18	1,15	716.550.942,00	
1 . 02 . 02 . 2.02 . 26	<i>Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>	10.282.926.764,00	6,37	85,05	5,42	8.746.070.116,00	85,05	5,42	1.536.856.648,00	
1 . 02 . 02 . 2.02 . 28	<i>Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional</i>	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	4.400.000,00	
1 . 02 . 02 . 2.02 . 32	<i>Operasional Pelayanan Rumah Sakit</i>	17.656.423.866,00	10,95	88,03	9,64	15.542.114.523,00	88,03	9,64	2.114.309.343,00	
1 . 02 . 02 . 2.02 . 33	<i>Operasional Pelayanan Puskesmas</i>	11.484.910.986,00	7,12	53,57	3,81	6.152.936.324,00	53,57	3,81	5.331.974.662,00	
1 . 02 . 02 . 2.02 . 34	<i>Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>	1.964.547.778,00	1,22	65,41	0,80	1.284.917.556,00	65,41	0,80	679.630.222,00	

1 . 02 . 02 . 2.02 . 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	786.226.500,00	0,49	88,09	0,43	692.625.600,00	88,09	0,43	93.600.900,00
1 . 02 . 02 . 2.02 . 40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	16.250.000,00	0,01	0,00	0,00	-	0,00	0,00	16.250.000,00
1 . 02 . 02 . 2.02 . 42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	239.700.000,00	0,15	100,00	0,15	221.990.652,00	92,61	0,14	17.709.348,00
<b>1 . 02 . 02 . 2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>1.204.595.500,00</b>				<b>1.182.722.617,00</b>			
1 . 02 . 02 . 2.03 . 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	155.345.000,00	0,10	100,00	0,10	155.062.117,00	99,82	0,10	282.883,00
1 . 02 . 02 . 2.03 . 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.049.250.500,00	0,65	100,00	0,65	1.027.660.500,00	97,94	0,64	21.590.000,00
<b>1 . 02 . 02 . 2.04</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>397.736.300,00</b>				<b>279.125.589,00</b>			
1 . 02 . 02 . 2.04 . 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	397.736.300,00	0,25	70,18	0,17	279.125.589,00	70,18	0,17	118.610.711,00
<b>1 . 02 . 03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>1.252.760.000,00</b>				<b>579.178.302,00</b>			
<b>1 . 02 . 03 . 2.01</b>	<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>87.390.000,00</b>				<b>46.120.000,00</b>			
1 . 02 . 03 . 2.01 . 02	<i>Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>	87.390.000,00	0,05	52,77	0,03	46.120.000	52,77	0,03	41.270.000,00
<b>1 . 02 . 03 . 2.02</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>624.399.000,00</b>				<b>533.058.302,00</b>			
1 . 02 . 03 . 2.02 . 01	<i>Perencanaan dan Distribusi Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	596.039.000,00	0,37	88,81	0,33	529.328.302,00	88,81	0,33	66.710.698,00
1 . 02 . 03 . 2.02 . 03	<i>Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	28.360.000,00	0,02	13,15	0,00	3.730.000,00	13,15	0,00	24.630.000,00
<b>1 . 02 . 03 . 2.03</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>540.971.000,00</b>				<b>382.740.442,00</b>			

1 . 02 . 03 . 2.03 . 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	540.971.000,00	0,34	70,75	0,24	382.740.442,00	70,75	0,24	158.230.558,00
<b>1 . 02 . 05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>931.765.600,00</b>				<b>356.809.800,00</b>			
<b>1 . 02 . 05 . 2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>270.854.300,00</b>				<b>237.123.000,00</b>			
1 . 02 . 05 . 2.01 . 01	<i>Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</i>	270.854.300,00	0,17	87,55	0,15	237.123.000,00	87,55	0,15	33.731.300,00
<b>1 . 02 . 05 . 2.02</b>	<b>Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>191.563.300,00</b>				<b>119.686.800,00</b>			
1 . 02 . 05 . 2.02 . 01	<i>Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i>	191.563.300,00	0,12	62,48	0,07	119.686.800,00	62,48	0,07	71.876.500,00
<b>1 . 02 . 05 . 2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>469.348.000,00</b>				<b>423.220.078,00</b>			
1 . 02 . 05 . 2.03 . 01	<i>Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>	469.348.000,00	0,29	90,17	0,26	423.220.078,00	90,17	0,26	46.127.922,00
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								
<b>2 . 14</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>								
<b>2 . 14 . 02</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>1.554.296.800,00</b>				<b>763.208.006,00</b>			
<b>2 . 14 . 02 . 2.01</b>	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah</b>	<b>141.545.000,00</b>				<b>123.259.544,00</b>			

	<b>Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>									
2 . 14 . 02 . 2.01 . 09	<i>Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal</i>	141.545.000,00	0,09	87,08	0,08	123.259.544,00	87,08	0,08	18.285.456,00	
<b>2 . 14 . 02 . 2.02</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.412.751.800,00</b>				<b>639.948.462,00</b>				
2 . 14 . 02 . 2.02 . 08	<i>Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain</i>	179.819.500,00	0,11	100,00	0,11	167.616.000,00	93,21	0,10	12.203.500,00	
2 . 14 . 02 . 2.02 . 09	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga</i>	64.200.000,00	0,04	98,48	0,04	63.226.000,00	98,48	0,04	974.000,00	
2 . 14 . 02 . 2.02 . 12	<i>Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga</i>	38.400.000,00	0,02	100,00	0,02	38.400.000,00	100,00	0,02	-	
2 . 14 . 02 . 2.02 . 13	<i>Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</i>	18.000.000,00	0,01	0,00	0,00	-	0,00	0,00	18.000.000,00	
2 . 14 . 02 . 2.02 . 14	<i>Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK</i>	1.112.332.300,00	0,69	33,33	0,23	370.706.462,00	33,33	0,23	741.625.838,00	
<b>2 . 14 . 03</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>1.923.249.200,00</b>				<b>1.264.666.158,00</b>				
<b>2 . 14 . 03 . 2.01</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>589.272.600,00</b>				<b>372.132.600,00</b>				
2 . 14 . 03 . 2.01 . 01	<i>Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</i>	80.000.000,00	0,05	50,10	0,02	40.080.000,00	50,10	0,02	39.920.000,00	
2 . 14 . 03 . 2.01 . 06	<i>Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</i>	65.000.000,00	0,04	7,26	0,00	4.720.000,00	7,26	0,00	60.280.000,00	
2 . 14 . 03 . 2.01 .	<i>Pengelolaan Operasional dan Sarana</i>	144.450.000,00	0,09	71,04	0,06	102.624.000,00	71,04	0,06	41.826.000,00	

07	<i>di Balai Penyuluhan KKBPK</i>									
2 . 14 . 03 . 2.01 . 08	<i>Pengendalian Program KKBPK</i>	299.822.600,00	0,19	74,95	0,14	224.708.600,00	74,95	0,14	75.114.000,00	
<b>2 . 14 . 03 . 2.02</b>	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>312.000.000,00</b>				<b>312.000.000,00</b>				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
2 . 14 . 03 . 2.01 . 01	<i>Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan Oleh PKB/PLKB</i>	62.000.000,00	0,04	100,00	0,04	62.000.000,00	100,00	0,04	-	
2 . 14 . 03 . 2.01 . 04	<i>Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>	250.000.000,00	0,15	100,00	0,15	250.000.000,00	100,00	0,15	-	
<b>2 . 14 . 03 . 2.03</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>680.031.400,00</b>				<b>606.166.200,00</b>				
2 . 14 . 03 . 2.03 . 01	<i>Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasiitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	17.100.000,00	0,01	99,70	0,01	17.048.000,00	99,70	0,01	52.000,00	
2 . 14 . 03 . 2.03 . 03	<i>Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>	37.153.000,00	0,02	89,09	0,02	33.100.000,00	89,09	0,02	4.053.000,00	
2 . 14 . 03 . 2.03 . 06	<i>Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>	310.395.000,00	0,19	97,94	0,19	303.995.000,00	97,94	0,19	6.400.000,00	
2 . 14 . 03 . 2.03 . 08	<i>Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	12.300.000,00	0,01	30,70	0,00	3.776.000,00	30,70	0,00	8.524.000,00	
2 . 14 . 03 . 2.03 . 09	<i>Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan</i>	205.359.400,00	0,13	86,91	0,11	178.477.600,00	86,91	0,11	26.881.800,00	
2 . 14 . 03 . 2.03 . 11	<i>Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak</i>	97.724.000,00	0,06	71,39	0,04	69.769.600,00	71,39	0,04	27.954.400,00	
<b>2 . 14 . 03 . 2.04</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah</b>	<b>341.945.200,00</b>				<b>286.367.358,00</b>				

	<b>Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>									
2.14.03.2.04.03	<i>Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB</i>	341.945.200,00	0,21	83,75	0,18	286.367.358,00	83,75	0,18	55.577.842,00	
<b>2.14.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>1.404.741.000,00</b>				<b>1.387.496.600,00</b>				
<b>2.14.04.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>1.404.741.000,00</b>				<b>1.387.496.600,00</b>				
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	355.994.000,00	0,22	100,00	0,22	352.398.000,00	98,99	0,22	3.596.000,00	
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	360.000.000,00	0,22	100,00	0,22	349.200.000,00	97,00	0,22	10.800.000,00	
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	313.237.500,00	0,19	100,00	0,19	312.905.100,00	99,89	0,19	332.400,00	
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	60.509.500,00	0,04	100,00	0,04	59.121.500,00	97,71	0,04	1.388.000,00	

2 . 14 . 04 . 2.01 . 05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	315.000.000,00	0,20	100,00	0,20	313.872.000,00	99,64	0,19	1.128.000,00
		<b>161.301.442.128,00</b>	<b>100,00</b>	<b>84,55</b>	<b>84,55</b>	<b>136.378.615.473,00</b>	<b>84,55</b>	<b>84,55</b>	<b>24.922.826.655,00</b>

**Keterangan :**

- 1 = Kode Urusan/Program/Kegiatan
- 2 = Uraian
- 3 = Anggaran
- 4 = Bobot = (Sub Kegiatan/total pagu OPD) x 100
- 5 = Fisik Lapangan (Dengan cara manual menyesuaikan dengan kegiatan dan waktu kegiatan) (Fisik 5) tidak boleh lebih rendah dari keuangan (8)
- 6 = % Tertimbang Fisik = (4x5)/100
- 7 = Realisasi Pembiayaan (Penggunaan Dana)
- 8 = % Keuangan = (7/3)x100
- 9 = % Tertimbang Keuangan = (3x8)/100
- 10 = Sisa Dana = 3 - 7
- 11 = Pointer Keterangan

**Keterangan :**

- 1. Mengisi Fisik (6) dengan Cara Manual menyesuaikan dengan kegiatan dan waktu kegiatan
- 2. Fisik % (6) tidak boleh lebih rendah dari keuangan % (10)
- 3. Mengisi Keuangan (8) menyesuaikan dengan SPJ yang sudah diinput di keuangan OPD

Ujoh Bilang, 30 Januari 2024  
Kepala Dinas Kesehatan P2KB

/Pengguna Anggaran



**dr. Petronela Tugan, M.Kes**  
NIP. 19780220 201001 2 009

### **C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan**

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemu kenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal.. Berikut akan disampaikan beberapa permasalahan yang ada berdasarkan Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Sukamara, yaitu:

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2021 adalah:

1. Masih ada masyarakat yang belum mendapatkan jaminan kesehatan
2. Akuntabilitas kinerja belum efektif.
3. Banyak balita yang belum mendapatkan imunisasi lengkap dengan berbagai factor penyebabnya sehingga meski yang memiliki kartu imunisasi balita cukup dominan namun belum semua imunisasi mampu diberikan pada seluruh balita.
4. Kebutuhan tenaga kesehatan di Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2021, seperti dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, ATEM (Ahli Tehknik Elektro MedikSanitarian (Kesehatan Lingkungan), masih dibawah standar ratio per 100.000 penduduk, belum dapat terpenuhi sepenuhnya, baik jumlah, jenis dan distribusinya menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, di samping itu juga menimbulkan permasalahan pada rujukan dan penanganan pasien untuk kasus tertentu. Kualitas tenaga kesehatan juga masih rendah, pengembangan karier belum berjalan, sistem penghargaan, dan sanksi belum sebagaimana mestinya.
5. Masih rendahnya Jasa Pelayanan yang diterima oleh tenaga medis dengan spesialistik

husus dikarenakan salah satunya Jasa Pelayanan BPJS dalam bentuk kapitasi bukan pengklaiman INACBGs. Hal ini membuat kurangnya minat tenaga dokter spesialis untuk melamar ke RSP. GSM; Penggajian dokter spesialis yang belum sesuai standar IDI tahun 2013 juga menyebabkan kurangnya minat tenaga dokter spesialis untuk melamar ke RSP. GSM; Tren Rasio Dokter Spesialis hanya 2.9 per 100.000 Penduduk tahun 2021.

6. Distribusi obat yang masih terkendala dengan situasi geografis karena belum ada akses darat;
7. Belum optimalnya akses dan pelayanan kesehatan dasar di tingkat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
8. Cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan mengacu pada Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Sistem Kesehatan Kabupaten (SKP), tetapi pelaksanaannya belum optimal, belum terintegrasi dengan system lainnya. Perencanaan pembangunan kesehatan antara pusat dan daerah serta provinsi dan kab/kota belum sinkron dan dirasakan masih perlu peningkatan koordinasi lebih lanjut di tingkat pimpinan. Permasalahan tersebut antara lain muncul pada pembagian peran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk di dalamnya adalah masalah pembiayaan khususnya untuk kegiatan dan biaya operasional, munculnya permasalahan pada harmonisasi kebijakan, masalah pada pelaksanaan kebijakan termasuk sinkronisasi dinas kesehatan dan manajemen Rumah Sakit, serta perlu komitmen pemerintah daerah untuk biaya operasional dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar.
9. Sistem informasi kesehatan menjadi lemah setelah diterapkan kebijakan desentralisasi. Keterbatasan data menjadi kendala dalam pemetaan masalah dan penyusunan kebijakan. Pemanfaatan data belum optimal dan surveilans belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Proses desentralisasi yang belum optimal berpotensi menimbulkan masalah pada buruknya pelayanan kesehatan yang diberikan bagi masyarakat, yang akan berdampak pada capaian SPM masih ada yang dibawah target.
10. Masyarakat masih ditempatkan sebagai obyek

Dalam pembangunan kesehatan, promosi kesehatan belum banyak merubah perilaku masyarakat menjadi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pemanfaatan dan

kualitas Upaya Kesehatan bersumberdaya Masyarakat (UKBM), seperti Posyandu dan Poskesdes masih rendah. Upaya kesehatan juga belum sepenuhnya mendorong peningkatan atau perubahan pada perilaku hidup bersih dan sehat, yang mengakibatkantingginya angka kesakitan yang diderita oleh masyarakat. Angka kesakitan penduduk Mahakam Ulu pada tahun 2021 mencapai 8,58%, Kecenderungan meningkatnya penyakit menular berbasis lingkungan dan perilaku masyarakat terutama TB Paru dan HIV.

#### 11. Klasifikasi tipe Rumah Sakit

Bangunan fisik RS. Pratama Gerbang Sehat Mahulu dibangun tidak mengikuti standarisasi khusus bangunan rumah sakit berdasarkan PMK RI Nomor 24 Tahun 2016; Sehingga Status Rumah Sakit Pratama Gerbang Sehat Mahulu saat ini klasifikasi tipe Pratama, jenis pelayanan yang diberikan masih terbatas karena dianggap setara dengan puskesmas, sehingga membuat rancu dalam penggunaan tenaga yang ada dengan regulasi yang berlaku. Contoh terkait pelayanan Rehabilitasi Medik dengan tenaga fisioterapis, berdasarkan PMK yang ada belum menjadi pelayanan yang prioritas sehingga menjadi salah satu penghambat dalam pemenuhan sarana prasarana untuk pelayanan rehabilitasi medik; Pemanfaatan ruang perawatan digunakan sebagai gedung perkantoran, hal ini disebabkan karena tidak tersedianya tempat untuk kegiatan manajemen dan administrasi rumah sakit; Belum tersedianya ruangan khusus untuk pemularasan jenazah, ruang CSSD, ruang pemulihan post tindakan operasi, ruang isolasi khusus dan lain-lain; Penunjang serta ijin operasional ruang Radiologi yang tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat dioptimalkan; Penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masih terbatas.

#### 12. Alokasi dan komposisi pembiayaan kesehatan

Sumber dana APBD Kabupaten Mahakam Ulu masih didominasi untuk keperluan belanja tidak langsung (gaji pegawai), namun masih perlu evaluasi dalam ketepatan perencanaan penganggaran, karena anggaran kesehatan yang dinikmati oleh masyarakat

secara langsung masih sangat terbatas. Dan juga Akibat dari pembiayaan

kesehatan yang masih cenderung kuratif dibandingkan pada promotif dan preventif mengakibatkan pengeluaran pembiayaan yang tidak efektif dan efisien, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan pada kecukupan dan optimalisasi pemanfaatan pembiayaan kesehatan. Keterbatasan sumberdana untuk pemeliharaan membuat beberapa bangunan yangrusak belum direhabilitasi dan alat kesehatan belum semuanya dikalibrasi.

13. Masalah Gizi Ganda:

Gizi buruk dan gizi kurang masih belum tertuntaskan, sementara penyakit yang disebabkan oleh konsumsi zat gizi yang tidak seimbang mulai mendominasi 10 besar penyakit penyebab kematian.

Kasus gizi buruk dan gizi kurang di Kabupaten Mahakam Ulu masih saja ada walaupun dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

14. Kesehatan Ibu dan Anak

Kematian ibu dan anak yang bisa dicegah masih perlu terus diupayakan, misalnya yang dikarenakan perdarahan pada persalinan dan kehamilan di usia dini. Program 1000 hari pertama kehidupan dan pendidikan kesehatan reproduksi remaja menjadi harapan baru agar terjadi penurunan signifikan pada Angka Kematian Ibu dan Anak (Bayi).

15. Daerah endemis penyakit Demam Berdarah *Dengue* (DBD)

DBD merupakan penyakit menular yang sampai sekarang belum bisa dituntaskan di Kabupaten Mahakam Ulu , walaupun jumlah kematian kasus terus ditekan. Pemberantasan DBD tanpa didukung dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk secara masif oleh masyarakat menjadi pemicu sulit dituntaskannya DBD dari wilayah Mahakam Ulu.

16. Pola Penyakit degeneratif semakin meningkat

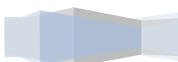
Trend pola penyakit menular semakin bergeser posisinya dengan penyakit- penyakit tidak menular atau penyakit infeksi menjadi non infeksi. Usia harapan hidup yang semakin meningkat rupanya juga membawa konsekuensi logis terhadap munculnya

kasus-kasus penyakit degeneratif, yang didukung dengan perilaku hidup yang tidak sehat.

Penyakit degeneratif yang menduduki sepuluh besar penyakit antara lain adalah hipertensi dan diabetes mellitus (DM).

17. Kondisi Kesehatan Lingkungan yang belum memadai.

Kesehatan lingkungan erat kaitannya dengan sanitasi dasar pada keluarga/masyarakat. Ketersediaan Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL), jamban keluarga, tempat sampah dan ketersediaan air bersih menjadi masalah sanitasi dasar yang belum tuntas. Dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut maka pelaku- pelaku pembangunan sarana kesehatan lingkungan perlu lebih banyak melibatkan lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).



Tabel. 2.9.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Dinas Kesehatan  
 Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam Ulu. Tahun 2021-2026

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Adanya kematian pada bayi dan balita	Adanya kematian bayi baru lahir dan bayi disebabkan Bayi Baru Lahir Rendah (BBLR), Asfiksia, kelainan bawaan, ikterus Dan penyebab lainnya, penyakit penyerta (pneumonia, diare, kelainan saluran cerna, sepsis, kelainan saraf dan kelainan kongenital
	Belum Terwujudnya Kabupaten Mahakam Ulu yang Sehat		Adanya kematian balita disebabkan Penyakit menular yaitu diare, pneumonia, campak dan lainnya
			Masih Tingginya faktor risiko pada ibu hamil dengan kelompok umur berisiko kekurangan energi kronik dan anemia
			Masih tingginya komplikasi pada ibu hamil, bayi dan balita
			Masih ada ibu, bayi dan balita yang belum Mendapatkan akses pada pelayanan kesehatan memenuhi standar
			Masih ada balita yang belum mendapatkan Imunisasi dasar lengkap
			Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam Kesehatan Ibu dan Anak
			Masih ada pertolongan persalinan oleh bukan Tenaga kesehatan (paraji) di wilayah tertentu
			RS belum memiliki Fasilitas intensif (ICU/NICU/PICU) sesuai standar
			Masih kurangnya pengetahuan ibu hamil dan ibu balita tentang kesehatan ibu dan anak
			Belum optimalnya sistem rujukan (masih ada rujukan berlapis atau keliling rumah sakit)
		Masih rendahnya status gizi masyarakat	Masih adanya masalah gizi pada ibu hamil, bayi dan balita, anak sekolah dan Calon Pengantin
			Masih adanya masalah gizi pada ibu hamil, bayi dan balita, anak sekolah dan Calon Pengantin
			Masih adanya masalah kesehatan gizi pada lansia
			Belum optimalnya pelayanan gizi masyarakat



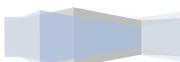
		Masih kurangnya peranSerta masyarakat / organisasi/lembaga dalam mendukung perilaku hidup bersih dansehat	Masih belum Optimalnya UKBM Kurangnya regulasiKurangnya kerjasama CSR Kurangnya kerjasama Dengan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
		Rendahnya Perilaku HidupBersih Sehat	Rendahnya perilaku HidupBersih dan Sehat,Rendahnya Kepatuhan Terhadap KTR, Rendahnyakomitmen pimpinan institusi terhadap KTR, Masih Belum Optimalnya UKBM, kurangnya regulasi kurangnya kerjasama dengan CSR, Kurangnya kerjasama dengan lembaga Swadaya Masyarakat
		Kecenderungan meningkatnya penyakit menular berbasis lingkungan dan perilaku masyarakat terutama TBParu dan HIV	Penyakit TB Paru 1. Trend TB MDR meningkat karna putus Minum obat, pengobatan yang berpindah-pindah,penderita TB RO yang belum ditemukan 2. Pasien TB tidak mau berobat 3. Lingkungan tidak memenuhi syarat
			1. Belum semua RS dan DPM adanya MOU DOTSPenyakit HIV/AIDS



			<p>2. Masih kurangnya akses kepada populasi kunci Dalam penanggulangan penyakit HIV</p> <p>3. Akses Penderita untuk pengobatan ARV masih rendah</p> <p>4. Kepatuhan Penderita untuk berobat masih rendah</p> <p>6. Masih tingginya stigma tentang Penyakit HIV Dan adanya pergesaeran nilai moral dari pengaruh sosial media yang tidak terkontrol.</p>
		<p>Kecenderungan meningkatnya penyakit tidak menular prioritas yaitu hipertensi , Diabetes Melitus</p>	<p>Penyakit Hipertensi : Gaya hidup yang tidak sehat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Merokok</li> <li>- Minum minuman beralkohol</li> <li>- Sering makan makanan asin</li> <li>- Sering makan makanan tinggi lemak</li> <li>- Sering makan/minum makanan/minuman manis-manis</li> <li>- Kurang sayur</li> <li>- Kurang buah</li> <li>- Kurang aktivitas fisik</li> <li>- Obesitas</li> </ul>
		Lingkungan yang belum sehat	
		Belum optimalnya akses dan pelayanan kesehatan dasar di tingkat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	Masih ada beberapa wilayah yang Kurang mendapatkan akses ke sarana kesehatan
			Masih ada puskesmas yang belum terpenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan
		Belum optimalnya akses dan pelayanan pada tingkat rujukan	Jumlah RS cukup namun namun keterbatasan Dokter spesialis sehingga masih sulit dijadikan pusat rujukan
			Kompetensi tenaga medis belum Optimal dalam Hal penanganan kasus rujukan
			Anggaran kurang memadai
			Akomodasi belum merata dan belum optimal
			Sistem regionalisasi belum Berjalan dengan Baik sehingga Terjadi penumpukan di beberapa IGD RS
			Sistem Rujukan online belum berjalan dengan optimal dikarenakan masalah kurangnya sdm pengelola, gangguan/pemeliharaan server, kurangnya koordinasi antar fasilitas kesehatan, gangguan karena cuaca, gangguan sinyal, kurangnya komitmen RS Dalam sistem rujukan.
			Sosialisasi tentang pelayanan kesehatan rujukan kepada tenaga medis dan masyarakat yang belum optimal
			Belum Adanya regulasi tingkat kota yang mengatur pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan
			Belum Mempunyai jaminan kesehatan

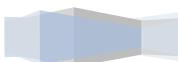


			Belum Tersedianya Public Savety Center (PSC) Sebagai pelaksana call center dan pelaksana layanan kegawatdaruratan medis di masyarakat
		Masih ada masyarakat yang belum mendapatkan jaminan kesehatan	Masalah Data kependudukan, yaitu tidak memiliki identitas, NIK tidak valid, NIK Belum update secara Nasional, dan NIK ganda
			Verifikasi Dan validasi data kemiskinan yang belum optimal dan tepat sasaran di wilayah dikarenakantingginya beban kerja sdm, jumlah sdm kurang, saranaprasarana kurang, anggaran kurang optimal, kompetensi sdm belum optimal
			Peserta JKN Menunggak dikarenakan keluarga tidak mampu, kurang sosialisasi/informasi, persepsi yang salah tentang JKN, tidak patuh pada regulasi JKN
			Stigma Masyarakat dan Stigma keagamaan yang tidak mendukung
			Punishment yang berjalan kurang optimal



			Kasus Penyakit tertentu tidak dijamin JKN
			Kesadaran Masyarakat yang kurang
			Sosialisasi belum optimal
			Kurangnya Monitoring dan pembinaan kepada penyedia jasa layanan kesehatan swasta (praktekmandiri) Keluarga Tidak mampu daftar BPJS dan belum terdaftar sebagai peserta JKN
			Regulasi JKN yang belum dapat Diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat
		Belum semua sarana kesehatan sesuai standart	Masih adanya Faskes atau sarana Kesehatan yang belum memiliki Surat Izin Operasional dan Tenaga Kesehatannya belum memiliki SIP, juga msh adanya Faskes yang belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Permenkes masing-masing Faskes seperti tidak sesuainya jumlah penyediaan ruang ICU NICU PICU sesuai PMK 56 thn 2014 utk RS serta kesesuaian tata graha dengan Permenkes no 75 thn 2014 untuk puskesmas dan Permenkes no 9 tahun 2014 untuk klinik
		Masih ada masyarakat yang belum mendapatkan jaminan kesehatan	Masih ada masyarakat yang tidak bisa didaftarkan ke JKN
			Kepeserta JKN Mandiri yang menunggak dan PPU
			Data kependudukan Peserta JKN tidak valid
		Kebutuhan sumber dayamanusia belum semua sesuai kompetensi	BBL (Bayi Baru Lahir) belum memiliki jaminan
			Terbatasnya rekrutmen tenaga Sesuai kompetensi dikarenakan adanya kebijakan pusat Tentang ketenagaan.
			Belum Semua jabatan fungsional memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)
			Pendidikan Dan latihan yang masih terbatas sesuai kebutuhan
			Keterbatasan sarana, prasarana dan SDM pendukung
			Integrasi data satu pintu masih manual dan partial
			Kurangnya komitmen pimpinan dalam Mendukung penerapan sistem informasi di Puskesmas dan RS (simpus, e-SIR, website,dll)
		Pengelolaan data informasi kesehatan masih belum optimal dalam mendukung pelayanan kesehatan	Pelayanan informasi Publik dan pengaduan publik belum terlayani dengan optimal.

dan dukungan masing-masing.

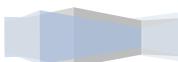


		Akuntabilitas kinerja belum efektif	Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran masih belum terpadu. Evaluasi kinerja belum dioptimalkan sebagai bahan acuan capaian kinerja.
--	--	-------------------------------------	---

Berdasarkan analisis, kajian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, maka dapat dirumuskan beberapa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang dapat ditindaklanjuti dengan rekomendasi berikut ini, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas kesehatan dengan berkolaborasi lintas sektor baik sektor pemerintah maupun sektor swasta sesuai dengan peran

dan dukungan masing-masing.

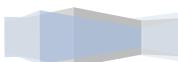


2. Meningkatkan kinerja program dengan optimalisasi peran masing-masing petugas.
3. Perubahan sistem evaluasi kinerja berbasis analisis, kebijakan & implementasi.
4. Mengoptimalkan pembinaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, prasarana dan sarana.
5. Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dan swasta di bidang kesehatan melalui promosi kesehatan.
6. Mengoptimalkan penguatan koordinasi lintas sektor.
7. Melakukan penerapan sistem informasi kesehatan serta peningkatan BLUD Puskesmas.
8. Menerapkan penilaian kenaikan pangkat berdasarkan pada kinerja sesuai dengan tupoksinya dan pencapaian indikator program dan kegiatan yang ditargetkan.

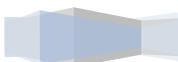
#### **D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rumusan program dan kegiatan yang diusulkan pada RKPD tahun 2023 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021 – 2026, SDG's dan SPM Bidang Kesehatan. Secara garis besar program dan kegiatan berbeda dari tahun sebelumnya. Dalam penyusunan dokumen perencanaan Program dan kegiatan disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jumlah anggaran dibandingkan dengan rancangan awal RKPD dimasing-masing program & kegiatan telah menyesuaikan kebutuhan yang direncanakan.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



Guna menghasilkan suatu rencana kerja SKPD yang selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah, maka diperlukan suatu telaahan (*review*) terhadap rancangan awal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023. Secara lebih rinci dituangkan dalam tabel 2.66.



**Tabel T-C.31. (210)**  
**Review terhadap Rancangan Awal RJPD tahun 2024 Kabupaten Mahakam Ulu**  
**Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu**

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PAGU Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Validasi	Keterangan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				124,107,717,042.00				Rp 168,611,793,287.00	44,504,076,245.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Mahakam Ulu	Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Dengan Baik	100%	74,558,024,337.00	Kab. Mahakam Ulu	Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Dengan Baik	100%	Rp 77,376,644,597.00	2,818,620,260.00
Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				217,094,000.00				Rp 277,802,900.00	60,708,900.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mahakam Ulu	Tersusunnya Dokumen Perangkat Daerah	1 Dokumen	24,400,000.00	Kab. Mahakam Ulu	Tersusunnya Dokumen Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp 52,963,200.00	28,563,200.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	119,574,000.00	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	Rp 118,633,200.00	940,800.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	36,560,000.00	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	Rp 70,587,200.00	34,027,200.00

		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	PAGU Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Validasi	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	36,560,000.00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 35,619,300.00	940,700.00
Administrasi Barang Milik daerah Pada Perangkat Daerah				116,936,720.00				Rp 187,960,000.00	71,023,280.00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	55,788,000.00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	Rp 83,900,000.00	28,112,000.00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	61,148,720.00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	Rp 104,060,000.00	42,911,280.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				33,420,506,217.00				Rp 39,427,833,497.00	6,007,327,280.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	272 Orang	32,640,486,217.00	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	272 Orang	Rp 38,669,210,297.00	6,028,724,080.00

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	706,320,000.00	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Rp 684,960,000.00	21,360,000.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20,020,000.00	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 20,019,400.00	600.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	53,680,000.00	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Rp 53,643,800.00	36,200.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				61,316,000.00				Rp 191,248,000.00	129,932,000.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Dokumen	61,316,000.00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Dokumen	Rp 191,248,000.00	129,932,000.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah				454,462,000.00				Rp 615,885,400.00	161,423,400.00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket	29,500,000.00	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket	Rp 76,906,000.00	47,406,000.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket	53,680,000.00	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket	Rp 134,937,300.00	81,257,300.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan	10 Paket	30,500,000.00	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan	10 Paket	Rp 30,499,100.00	900.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10 Buku	10,000,000.00	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10 Buku	Rp 6,535,000.00	3,465,000.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	330,782,000.00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Rp 367,008,000.00	36,226,000.00
Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian		PAGU Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Validasi	Keterangan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 53.824.000,00				Rp 85.885.200,00	Rp 32.061.200,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	Rp 19.500.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	Rp 54.280.200,00	Rp 34.780.200,00
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	1 Unit	Rp 34.324.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	1 Unit	Rp 31.605.000,00	-Rp 2.719.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 39.889.380.000,00				Rp 36.141.432.900,00	-Rp 3.747.947.100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	Rp 50.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	Rp 101.998.500,00	Rp 51.998.500,00

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	Rp 18.780.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	Rp 18.780.000,00	Rp -
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	Rp 39.820.600.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	Rp 36.020.654.400,00	-Rp 3.799.945.600,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 269.540.000,00				Rp 282.856.000,00	Rp 13.316.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14 Unit	Rp 135.508.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14 Unit	Rp 135.476.000,00	-Rp 32.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	Rp 62.440.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	Rp 75.980.000,00	Rp 13.540.000,00
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10 Unit	Rp 71.592.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10 Unit	Rp 71.400.000,00	-Rp 192.000,00
Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp 74.965.400,00				Rp 165.740.700,00	Rp 90.775.300,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	8 Unit	Rp 74.965.400,00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	8 Unit	Rp 165.740.700,00	Rp 90.775.300,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kab. Mahakam Ulu	Angka Usia Harapan Hidup	72.10	Rp 47.530.451.205,00	Kab. Mahakam Ulu	Angka Usia Harapan Hidup	72.10	Rp 88.192.334.940,00	Rp 40.661.883.735,00
		Persentase Balita Gizi Buruk	0.30			Persentase Balita Gizi Buruk	0.30		

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	19.12
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	570
Rasio posyandu per satuan balita	01:50 balita
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1.17
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0.07
Prevalensi stunting	18%
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	61 Orng/rujukan
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0.65
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	39 kasus
Angka kejadian Malaria	14
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari	2

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	19.12
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	570
Rasio posyandu per satuan balita	01:50 balita
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1.17
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0.07
Prevalensi stunting	18%
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	61 Orng/rujukan
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0.65
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	39 kasus
Angka kejadian Malaria	14
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari	2

	total populasi				total populasi				
	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	97%			Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	97%			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Rp 16.179.720.250,00			Rp 35.105.809.822,00	Rp 18.926.089.572,00	
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Mahakam Ulu	Terbangunannya Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	Rp 1.175.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terbangunannya Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	Rp 17.675.418.590,00	Rp 16.500.418.590,00
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kab. Mahakam Ulu	Terbangunnya Rumah Dinas Kesehatan	1 Unit	Rp 5.200.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terbangunnya Rumah Dinas Kesehatan	1 Unit	Rp 3.085.227.000,00	-Rp 2.114.773.000,00
Pengembangan Puskesmas	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengembangan Puskesmas	2 Unit	Rp 3.742.450.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengembangan Puskesmas	2 Unit	Rp 3.437.805.300,00	-Rp 304.644.700,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	Rp 590.900.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Unit	Rp 423.563.800,00	-Rp 167.336.200,00
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 Paket	Rp 2.000.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 Paket	Rp 3.529.621.900,00	Rp 1.529.621.900,00

Pengembangan Rumah Sakit	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Rumah Sakit Yang Ditingkatkan Ssarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM Agar Sesuai Standard Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit Yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2 Unit	Rp -	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Rumah Sakit Yang Ditingkatkan Ssarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM Agar Sesuai Standard Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit Yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2 Unit	Rp 1.913.392.132,00	Rp 1.913.392.132,00
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Mahakam Ulu	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Dokumen	Rp 24.830.500,00	Kab. Mahakam Ulu	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Dokumen	Rp 23.792.300,00	-Rp 1.038.200,00

Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	10 Unit	Rp 75.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	10 Unit	Rp 120.101.900,00	Rp 45.101.900,00
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4 Paket	Rp 3.371.539.750,00	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Obat dan Vaksin	4 Paket	Rp 4.082.611.800,00	Rp 711.072.050,00
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	10 Paket	Rp -	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	10 Paket	Rp 814.275.100,00	Rp 814.275.100,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Rp 31.269.090.955,00				Rp 52.603.256.318,00	Rp 21.334.165.363,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Mahakam Ulu	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standard	549 Orang	Rp 34.618.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standard	549 Orang	Rp 60.877.400,00	Rp 26.259.400,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Mahakam Ulu	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standard	549 Orang	Rp 97.820.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standard	549 Orang	Rp 62.437.400,00	-Rp 35.382.600,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Mahakam Ulu	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standard	540 Orang	Rp 100.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standard	540 Orang	Rp 119.079.600,00	Rp 19.079.600,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Mahakam Ulu	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standard	1678 Orang	Rp 347.500.800,00	Kab. Mahakam Ulu	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standard	1678 Orang	Rp 527.901.600,00	Rp 180.400.800,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Mahakam Ulu	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1 Dokumen	Rp 141.420.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1 Dokumen	Rp 228.183.800,00	Rp 86.763.800,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Mahakam Ulu	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1 Dokumen	Rp 200.005.900,00	Kab. Mahakam Ulu	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1 Dokumen	Rp 199.997.000,00	-Rp 8.900,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Sesuai Standard	1721 Orang	Rp 136.628.200,00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Sesuai Standard	1721 Orang	Rp 129.820.300,00	-Rp 6.807.900,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Mahakam Ulu	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1 Dokumen	Rp 132.352.400,00	Kab. Mahakam Ulu	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1 Dokumen	Rp 132.284.600,00	-Rp 67.800,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Mahakam Ulu	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1 Dokumen	Rp 166.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1 Dokumen	Rp 218.130.200,00	Rp 52.130.200,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standard	96 Orang	Rp 199.973.200,00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standard	96 Orang	Rp 199.972.200,00	-Rp 1.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standard	136 Orang	Rp 94.820.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standard	136 Orang	Rp 94.819.300,00	-Rp 700,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Sesuai Standard	1022 Orang	Rp 124.998.300,00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Sesuai Standard	1022 Orang	Rp 124.984.100,00	-Rp 14.200,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kab. Mahakam Ulu	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1 Dokumen	Rp 158.860.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1 Dokumen	Rp 158.860.000,00	Rp -
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	Rp 221.762.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	Rp 352.135.300,00	Rp 130.373.300,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	Rp 110.771.700,00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	Rp 187.994.800,00	Rp 77.223.100,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	Rp 111.933.300,00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	Rp 1.822.016.300,00	Rp 1.710.083.000,00

Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Mahakam Ulu	Terkelolanya Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	Rp -	Kab. Mahakam Ulu	Terkelolanya Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	Rp 220.477.200,00	Rp 220.477.200,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kab. Mahakam Ulu	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	Rp 53.727.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	Rp 174.390.500,00	Rp 120.663.500,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	Rp 158.860.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	Rp 373.139.400,00	Rp 214.279.400,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	4 Dokumen	Rp 394.241.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	4 Dokumen	Rp 417.431.700,00	Rp 23.190.700,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kab. Mahakam Ulu	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1 Dokumen	Rp -	Kab. Mahakam Ulu	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1 Dokumen	Rp 46.490.000,00	Rp 46.490.000,00
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Kab. Mahakam Ulu	Terkelolanya Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen	Rp -	Kab. Mahakam Ulu	Terkelolanya Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen	Rp 491.075.300,00	Rp 491.075.300,00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	Rp 249.986.180,00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	Rp 1.288.965.800,00	Rp 1.038.979.620,00
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	Rp 8.347.833.400,00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	Rp 10.463.562.700,00	Rp 2.115.729.300,00

Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1 Dokumen	Rp -	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1 Dokumen	Rp 61.600.000,00	Rp 61.600.000,00
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2 Dokumen	Rp 13.587.860.900,00	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2 Dokumen	Rp 24.561.213.472,00	Rp 10.973.352.572,00
Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	6 Dokumen	Rp 5.472.683.675,00	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	6 Dokumen	Rp 8.446.520.946,00	Rp 2.973.837.271,00
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	Rp 471.886.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	Rp 852.358.600,00	Rp 380.472.600,00
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	3 Unit	Rp 92.973.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	3 Unit	Rp 89.443.800,00	-Rp 3.529.200,00
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Dokumen	Rp -	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Dokumen	Rp 64.840.000,00	Rp 64.840.000,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kab. Mahakam Ulu	Terkelolanya pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	10 Orang	Rp -	Kab. Mahakam Ulu	Terkelolanya pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	10 Orang	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Kab. Mahakam Ulu	Terkelolanya pelayanan kesehatan Malaria	1 Dokumen	Rp -	Kab. Mahakam Ulu	Terkelolanya pelayanan kesehatan Malaria	1 Dokumen	Rp 41.900.000,00	Rp 41.900.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kab. Mahakam Ulu	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1 Dokumen	Rp -	Kab. Mahakam Ulu	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1 Dokumen	Rp 7.100.000,00	Rp 7.100.000,00

Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Kab. Mahakam Ulu	Terkoordinasi dan Tersinkronisasi Penerapannya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 59.576.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terkoordinasi dan Tersinkronisasi Penerapannya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 59.575.000,00	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kab. Mahakam Ulu	Terkelolanya upaya kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	Rp -	Kab. Mahakam Ulu	Terkelolanya upaya kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	Rp 319.678.000,00	Rp 319.678.000,00
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	6 Unit	Rp 81.640.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	6 Unit	Rp 483.268.800,00	Rp 401.628.800,00
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				Rp 81.640.000,00				Rp 483.268.800,00	Rp 401.628.800,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kab. Mahakam Ulu	Rasio dokter per satuan penduduk	1:71	Rp 582.014.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Rasio dokter per satuan penduduk	1:71	Rp 831.592.200,00	Rp 249.578.200,00
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1:59			Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1:59		
		Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas	90%			Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas	90%		
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				Rp 194.531.000,00				Rp 181.340.600,00	-Rp 13.190.400,00

Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	Rp 99.999.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	Rp 91.103.600,00	-Rp 8.895.400,00
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Mahakam Ulu	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	Rp 94.532.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	Rp 90.237.000,00	-Rp 4.295.000,00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang	Rp 387.483.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang	Rp 650.251.600,00	Rp 262.768.600,00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Rp 387.483.000,00				Rp 650.251.600,00	Rp 262.768.600,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				Rp 89.000.000,00				Rp 307.061.900,00	Rp 218.061.900,00
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				Rp 43.000.000,00				Rp 25.556.000,00	-Rp 17.444.000,00

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	Rp 25.556.000,00	Rp 5.556.000,00
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	Rp 13.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	Rp -	-Rp 13.000.000,00
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	Rp 10.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	Rp -	-Rp 10.000.000,00
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				Rp 30.000.000,00				Rp 265.620.700,00	Rp 235.620.700,00

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	Rp 30.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	Rp 265.620.700,00	Rp 235.620.700,00
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				Rp 10.000.000,00				Rp 9.930.700,00	-Rp 69.300,00
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	Rp 10.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	Rp 9.930.700,00	-Rp 69.300,00
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan				Rp 6.000.000,00				Rp 5.954.500,00	-Rp 45.500,00

Jajanan									
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	Rp 6.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	Rp 5.954.500,00	-Rp 45.500,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kab. Mahakam Ulu	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	72 persen	Rp 301.863.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	72 persen	Rp 537.417.000,00	Rp 235.554.000,00
		Cakupan rumah tangga sehat (PHBS Rumah Tangga)	3.2 persen (630 RT)			Cakupan rumah tangga sehat (PHBS Rumah Tangga)	3.2 persen (630 RT)		
		Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	21 KLB			Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	21 KLB		
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	6 Unit	Rp 141.240.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	6 Unit	Rp 228.004.900,00	Rp 86.764.900,00
Pelaksanaan Sehat dalam rangka				Rp 79.402.000,00				Rp 229.426.200,00	Rp 150.024.200,00

Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Mahakam Ulu	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	Rp 79.402.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	Rp 229.426.200,00	Rp 150.024.200,00
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Rp 81.221.000,00				Rp 79.985.900,00	-Rp 1.235.100,00
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	Rp 81.221.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	Rp 79.985.900,00	-Rp 1.235.100,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kab. Mahakam Ulu	Total fertility Rate	0	Rp 169.501.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Total fertility Rate	0	Rp 369.477.500,00	Rp 199.976.500,00
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan	10 Satuan Pendidikan	Rp -	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan	10 Satuan Pendidikan	Rp 199.977.400,00	Rp 199.977.400,00

Nonformal dan Informal		Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal			
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				Rp 169.501.000,00				Rp 169.500.100,00	-Rp 900,00
Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Kab. Mahakam Ulu	Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan , dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	2 Unit	Rp 65.481.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan , dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	2 Unit	Rp 65.481.000,00	Rp -
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	Rp 104.020.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	Rp 104.019.100,00	-Rp 900,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kab. Mahakam Ulu	Ratio Akseptor KB Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	73% 91%	Rp 440.929.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Ratio Akseptor KB Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	73% 91%	Rp 440.797.000,00	-Rp 132.000,00
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan				Rp 130.957.000,00				Rp 130.955.900,00	-Rp 1.100,00

Budaya Lokal									
Pengendalian Program KKBPK	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	Rp 130.957.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	Rp 130.955.900,00	-Rp 1.100,00
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				Rp 309.972.000,00				Rp 309.841.100,00	-Rp 130.900,00
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan Jejaringnya	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	50 Orang	Rp 195.070.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	50 Orang	Rp 194.940.000,00	-Rp 130.000,00
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	5 Laporan	Rp 114.902.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	5 Laporan	Rp 114.901.100,00	-Rp 900,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kab. Mahakam Ulu	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	150 KK dalam kelompok Poktan di 10 Kampung KB	Rp 435.934.500,00	Kab. Mahakam Ulu	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	150 KK dalam kelompok Poktan di 10 Kampung KB	Rp 556.468.150,00	Rp 120.533.650,00
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				Rp 435.934.500,00				Rp 556.468.150,00	Rp 120.533.650,00

Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kab. Mahakam Ulu	Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	250 Kelompok	Rp 123.746.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	250 Kelompok	Rp 123.745.250,00	-Rp 750,00
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	Rp 64.522.000,00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	Rp 185.056.400,00	Rp 120.534.400,00
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	150 Orang	Rp 247.666.500,00	Kab. Mahakam Ulu	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	150 Orang	Rp 247.666.500,00	Rp -

	s)				s)			
--	----	--	--	--	----	--	--	--

#### **E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat telah dirangkum dari hasil Musrenbang Kecamatan tahun 2023. Hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa sebagian besar usulan dari masyarakat untuk pembangunan bidang kesehatan telah dilimpahkan ke SKPD Kecamatan. Namun demikian kegiatan yang belum difasilitasi oleh Kecamatan, akan diampu oleh Puskesmas setempat kecuali kegiatan yang berorientasi pengadaan sarana/ barang akan diakomodir oleh Dinas Kesehatan.

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan antara lain Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya ( Mes bagi Tenaga Medis), Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya ( Semenisasi Halaman Pustu Kampung Memahak Besra guna menunjang Kebersihan dan Kenyamanan), Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan ( Mobil Ambulan Guna meningkatkan pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat) dan lain laian.

Berdasarkan rangkuman usulan program dan kegiatan dari masyarakat tersebut, bahwa seluruhnya telah secara rutin dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat yang ada di Puskesmas. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat tersebut disajikan dalam tabel 2.67. Usulan Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu pada tabel berikut ini:





### BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

#### A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Secara nasional, indikator kinerja didasarkan pada pencapaian SPM. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :Telaah terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Kebijakan Nasional sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah, maka dinas Kesehatan mendukung Prioritas Nasional 1 yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas dengan arah kebijakan bidang Kesehatan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Sedangkan Tujuan dari arah kebijakan bidang kesehatan adalah derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud yang berfokus pada penduduk rentan, yaitu ibu, bayi, anak, manula, dan keluarga miskin.

Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan. Visi Kementerian Kesehatan sebagaimana yang tertuang dalam rancangan awal Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020–2024 adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan untuk Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Masdir, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”***, sedangkan Misi Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkauseluruh penduduk Indonesia.
- b. Memberdayakan masyarakat dan mengutamakan pembangunan kesehatan.
- c. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumberdaya kesehatan.
- d. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih daninovatif.

Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan juga menjadi perhatian penting bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu dalam menetapkan indikator tujuan, indikator sasaran dan indikator program dan menjadi acuan dalam rangka penyusunan perencanaan tahunan. Perencanaan tahunan tersebut disusun dengan memperhatikan unsur integrasi dan sinergi sehingga ada keterkaitan antar dokumen perencanaan.

**B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi, misi dalam konteks ini merupakan visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2021-2026 yaitu Bapak Bonifasius Belawan Geh, SH. dan Drs. Yohanes Avun, M.Si. Sedangkan tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan hasil akhir yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu kepemimpinan Bupati bersama Wakil Bupati. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

1. VISI

Visi Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu periode 2021-2026 yaitu Bapak Bonifasius Belawan Geh, SH. dan Drs. Yohanes Avun, M.Si adalah:

***“Membangun Mahulu Untuk Semua, Sejahtera, Berkeadilan”***

Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai (value) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam misi pembangunan.

Adapun pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026

Tabel 3.1

**Pokok-Pokok Visi Kabupaten Mahakam Ulu**

No	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
1.	Mahulu Untuk Semua	Mahulu adalah kabupaten Mahakam Ulu, sebuah wilayah administratif dan geografis setingkat kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. "Untuk Semua" mengandung arti bahwa seluruh atau segenap masyarakat Mahakam Ulu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan tanpa diskriminasi, baik wilayah, agama, ras, etnis, kondisi fisik dan gender.

2.	SEJAHTERA	Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera artinya tenteram, selamat sentosa, dan senang. Artinya kondisi manusia di mana masyarakatnya dalam keadaan sehat, damai, dan senang. Dalam buku Indonesia Macroeconomic Outlook (2009) oleh Universitas Indonesia, masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang dapat menikmati kemakmuran secara utuh, tidak miskin, tidak menderita kelaparan, menikmati pendidikan, mampu mengimplementasikan kesetaraan gender, dan merasakan fasilitas kesehatan secara merata.
----	-----------	---

		<p>Sejahtera dalam makna terdalamnya adalah bahwa masyarakat Mahakam Ulu melalui proses pembangunan dapat menikmati kehidupan yang layak, aman dan manusiawi. Kehidupan yang layak, aman dan manusiawi berarti bahwa setiap warga dapat terpenuhi hak untuk sehat dan berpendidikan yang layak, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, tidak tersisihkan dalam kehidupan sosial, mendapatkan jaminan rasa aman dan menjadi bagian dari komunitas yang sehat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial sebagai warga Mahakam Ulu.</p> <p>Untuk merealisasikan visi ini, maka tata kelola pemerintahan di Mahakam Ulu akan diabdikan tidak saja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun juga diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup sosial warga, sehingga warga Mahakam Ulu memiliki etos hidup yang optimis dan memiliki harapan yang baik bagi masa depan diri, keluarga, komunitas maupun Kabupaten Mahakam Ulu.</p>
3.	BERKEADILAN	<p>Pembangunan Mahakam Ulu 2021-2026 mengedepankan pada konsep pembangunan berkeadilan. Pembangunan akan lebih fokus pada program-program dalam rangka memperkecil ketidakmerataan/ketimpangan kesejahteraan. Pembangunan tidak hanya difokuskan pada daerah ibu kota pemerintahan saja, akan tetapi pemerataan pembangunan juga akan dilakukan pada seluruh wilayah penyangga Kabupaten Mahakam Ulu serta daerah terluar (perbatasan) sesuai dengan konsep pembangunan pada RTRW.</p> <p>Mahakam Ulu memandang paradigma pertumbuhan ekonomi di masa depan tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi harus memperhatikan pembangunan yang inklusif. Hal ini didasari atas kesadaran bahwa pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi kepada pertumbuhan, telah menghasilkan eksklusi sosial dan tiga krisis besar, berupa: ketimpangan sosial, kemiskinan dan kerusakan lingkungan, sehingga perlu paradigma pembangunan baru yang lebih bersifat inklusif. World Economic Forum (WEF) mendefinisikan ekonomi inklusif sebagai suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, selanjutnya Bappenas mendefinisikan pembangunan ekonomi inklusif sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.</p> <p>Pembangunan yang merata diyakini merupakan solusi yang paling tepat dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Mahakam Ulu. Diharapkan dengan konsep pembangunan yang berkeadilan, seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah Kabupaten Mahakam Ulu dapat ikut berpartisipasi dalam memajukan perekonomian Mahakam Ulu.</p>

Visi Kabupaten Mahakam Ulu periode 2021-2026 menitikberatkan pada pembangunan

yang adil dan merata sehingga kesejahteraan dapat dinikmati oleh semua masyarakat Mahakam Ulu. Visi Kabupaten Mahakam Ulu periode 2021-2026 sudah selaras dengan visi RPJMN 2020-2024 dan visi Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023.



Gambar 3.4 Keselarasan Visi Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Mahakam Ulu

Visi Mahakam Ulu yang menitik beratkan pada point “sejahtera” dan “berkeadilan” telah selaras dengan visi Provinsi dan Nasional point “berdaulat”, yang mempunyai makna memiliki kemantapan dalam ekonomi dan ketercukupan kebutuhan dasar bagi semua masyarakat Mahakam Ulu.

## 2. MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026 seperti yang telah ditetapkan di atas, maka dirumuskan misi Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu sebagai berikut:

- a. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal

- c. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi.
- d. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel

### **C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi**

Sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, visi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah : ” Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat” Untuk mewujudkan visi maka diperlukan serangkaian misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan melihat fokus dan peta permasalahan dan isu strategis serta amanat misi dalam RPJPD dan RPJMN maka arahan misi pembangunan 2019-2023 adalah :

1. Berdaulat dalam pembangunan sumberdaya manusia yang berahlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.
6. Dari misi RPJMD di atas tampak jelas bahwa Dinas Kesehatan sekurang-kurangnya berhubungan misi berdaya saing yaitu misi pertama.
7. Berkaitan dengan visi tentang daya saing, Dinas Kesehatan harus mampu mendefinisikan bagaimana daya saing SDM kesehatan yang ada dengan jelas  
Telaahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024:

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.**

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.

Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar Pembangunan, yakni layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan pembangunan karakter. Melalui tiga pilar ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM menjadi sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pilar layanan dasar dan perlindungan sosial mencakup tata kelola kependudukan, perlindungan

sosial, kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Pilar peningkatan produktivitas mencakup pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan tinggi, penguatan IPTEK-Inovasi, dan peningkatan prestasi olah raga. Pilar pembangunan karakter mencakup revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, pemajuan dan pelestarian kebudayaan, penguatan moderasi beragama, peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Pembangunan kesehatan mempunyai peran sentral sebagai pondasi dalam peningkatan kualitas SDM, khususnya terkait aspek pembangunan sumber daya manusia sebagai modal manusia (human capital). Indeks modal manusia (Human Capital Index) mencakup parameter:

- 1) Survival, diukur dari probabilitas keberlangsungan hidup hingga umur 5 tahun (probability of survival to age 5),
- 2) Pendidikan, diukur dari ekspektasi jumlah tahun sekolah dan skor tes terharmonisasi (expected years of schooling dan harmonized test scores), dan
- 3) Kesehatan, diukur dari survival rate usia 15 – 60 tahun dan proporsi anak dibawah usia 5 tahun yang tidak mengalami stunting.

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
8. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi Angka kematian ibu (maternal mortality rate) dan angka kematian bayi (infant mortality rate) merupakan

indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai major project, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

2. Menurunkan angka stunting pada balita Proporsi balita stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai major project yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.
3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat.

Namun demikian, pembiayaan JKN selama lima tahun terakhir telah mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalam kendali mutu dan kendali biaya (cost containment).

4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Sesuai dengan peta jalan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan industri bahan baku obat dan juga peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri. Agar produksi dalam negeri ini dapat diserap oleh pasar, pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong penggunaan obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri.

**D. Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:**

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

**E. Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan tersebut di atas, ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis sebagai berikut:**

Tabel 3.2 Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan

No	Tujuan Strategis	No	Sasaran Strategis
1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	1	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizimasyarakat
2	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	2	Meningkatnya ketersediaan dan mutufasyankes dasar dan rujukan
	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	3	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
	Peningkatan sumber dayakesehatan	4	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutukefarmasian dan alat kesehatan
		5	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
		6	Terjaminnya pembiayaan kesehatan
	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	7	Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
		8	Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

## F. Penentuan Isu–Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah:

1. Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi Kesehatan.
2. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang terdiri dari :
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015-2025.
  - b. Isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi lingkungan, perilaku masyarakat, sarana prasarana pelayanan kesehatan saat ini, serta kemungkinan pengaruh lainnya.
  - c. Sasaran-sasaran pembangunan yang belum dapat dipenuhi pada masa RPJMD/Target Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan sebelumnya.

Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam Rencana Strategis ini

ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria yaitu memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah dan nasional; merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; mempunyai dampak yang luas terhadap daerah

dan masyarakat; memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan kesehatan; dan kemudahannya untuk dikelola.

Memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini, maka isu strategis yang masih dihadapi oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan tujuan yang ingin dicapai adalah :

Berdasarkan penjabaran mengenai permasalahan pembangunan kesehatan di Kabupaten Mahakam Ulu, maka dapat dirumuskan Analisis SWOT Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Mahakam Ulu sebagai berikut :

### **Strenght**

Berdasarkan analisa terhadap berbagai masalah kesehatan yang dihadapi, ditemukan kekuatan, antara lain:

- a. Semangat membangun kampung halaman tinggi
- b. Perhatian dari Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tentang pembangunan kesehatan yang cukup tinggi
- c. Kondisi alam yang masih natural
- d. Adanya pemerintah baru sehingga Dinas Kesehatan yang baru mudah dalam meletakkan dasar-dasar kebijakan kesehatan yang baik
- e. Penduduk masih sedikit, Puskesmas masih sedikit, sehingga relatif mudah ditata.

### **Weakness**

Namun segala kekuatan yang ditemukan masih ada beberapa kelemahan yang ditemukan, antara lain:

- a. SDM Kesehatan masih kurang baik dari mutu maupun jumlahnya
- b. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, baik di sarana pelayanan dasar maupun rujukan
- c. Pelayanan yang masih belum Prima
- d. Rendahnya tingkat manajerial kesehatan dan
- e. Kemampuan untuk menjaga aset kesehatan dan rasa memilikinya masih rendah.

### **Opportunity**

Peluang yang dapat ditangkap dibalik hambatan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Mahakam Ulu adalah:

- a. Perhatian dan dukungan dari Daerah dan Pemerintah Provinsi bagi daerah DTPK;
- b. Adanya Peraturan Pusat yang mendukung terciptanya aparatur pemerintah yang Baik dan Bersih;
- c. Adanya pihak Swasta yang bisa menjadi mitra dalam Pembangunan Kesehatan dan Tingkat kepatuhan masyarakat masih relatif tinggi.

## **Threat**

Tantangan (ancaman) dalam peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Mahakam Ulu antara lain sebagai berikut :

- a. Adanya globalisasi pelayanan kesehatan yang menuntut kepada peningkatan kualitas pelayanan
- b. Adanya beban ganda dalam penanggulangan penyakit oleh karena munculnya penyakit-penyakit baru dan penyakit yang sudah pernah hilang muncul kembali sehingga penanganannya membutuhkan upaya yang lebih keras lagi.
- c. Luasnya wilayah Kabupaten Mahakam Ulu dan tingginya mobilitas penduduk memberikan tantangan dalam penanganan masalah kesehatan.
- d. Peran serta dan kemitraan yang belum terjalin dengan optimal dimana banyak kegiatan lintas sektor yang telah dilaksanakan tetapi belum berkembang dan berkesinambungan dengan baik.
- e. Pengetahuan dan pendidikan masyarakat tentang kesehatan yang masih rendah sehingga akan berpengaruh terhadap partisipasinya.
- f. Kondisi geografis yang jauh dan terpencil
- g. Keterisolasian daerah
- h. Sarana informasi dan komunikasi kurang
- i. Transportasi sulit dan mahal
- j. Harga kebutuhan hidup yang tinggi
- k. Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat kurang

## **G. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan tahun 2023 adalah sebagaimana berikut:

### **1. Tujuan**

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu selama 5 tahun anggaran sampai tahun 2025 adalah "Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri Untuk Hidup Sehat". Dengan Indikator tujuan sebagai berikut:

- a. Usia Harapan Hidup
- b. Persentase balita gizi buruk
- c. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
- d. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup
- e. Prevalensi Penurunan stanting

## 2. Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026

N o.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Angka usia harapan hidup	72.20	72.30	72.40	72.50	72.60	72.70
	Persentase balita gizi buruk	0,20	0,25	<b>0,15</b>			
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup		2	<b>7</b>			
	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup		2	<b>0</b>			
	Prevalensi Penurunan stanting		22	<b>7,5</b>			

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu, 2021*

## H. Program dan Kegiatan Renja Dinas Kesehatan

### 1. Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan penyusunan rumusan program dan kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2025v adalah sebagai berikut:

- a. Dalam rangka mendukung pencapaian target SDGs maka program yang dipilih disesuaikan dengan RPJMN Bidang Kesehatan dengan tidak meninggalkan kearifan lokal spesifik Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan juga menjadi salah satu pertimbangan. Program dan kegiatan yang dirumuskan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu harus

mendongkrak capaian indikator SPM terhadap target yang telah ditetapkan.

- c. Dalam mendukung program Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kabupaten Mahakam Ulu, Dinas kesehatan melalui program jaminan pembiayaan dan pemeliharaan kesehatan telah menjamin penduduk miskin di Kabupaten Mahakam Ulu mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.
- d. Diperlukan sistem surveilans dan sistem informasi kesehatan untuk perencanaan yang berbasis data dan informasi yang akurat;
- e. Meningkatkan jejaring kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor dan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan kalangan swasta.

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 dirumuskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan terdiri dari 2 urusan yaitu **urusan Pemerintah bidang kesehatan dan Urusan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**, merumuskan 7 (Tujuh) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan, 54 Sub Kegiatan. Secara rinci Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Tahun 2023

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
<b>Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		

Pengadaan peralatan mesin dan lainnya

#### **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

#### **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan

Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

#### **Peningkatan Pelayanan BLUD**

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

### **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**

#### **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**

##### **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota**

Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Pengembangan Rumah Sakit

Pengembangan Puskesmas

Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi

Pengadaan Obat, Vaksin

Pengadaan Bahan Habis Pakai

##### **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya

Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Operasional Pelayanan Puskesmas

Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

##### **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**

Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

#### **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

##### **Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota**

Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota**

Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**

**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

**Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**

**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**

Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal

**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**

Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain  
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK

**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**

**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**

Pengendalian Program KKBPK

**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota**

Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan  
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak

**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**

**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)

Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)



**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2023**

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 tertuang dalam program dan kegiatan yang disusun berdasarkan:

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Prioritas Pembangunan Daerah.
3. Pencapaian SPM.
4. Pencapaian IKU.
5. Tupoksi Dinas Kesehatan Kabupaten MahakamUlu,
6. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023,
7. Isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagaimana dalam lampiran berikut ini :

**Tabel  
4.1  
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

**Perangkat Daerah Tahun 2023 Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	RENCANA TAHUN 2025				KET
						TARGET CAPAIAN KINERJA (VOLUME)	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Terlaksananya pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	Presentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100 Persen	Rp 83.362.087.641	APBD	Mahakam Ulu	
I		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Rp 462.739.900	APBD	Mahakam Ulu	
1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp 125.899.200	APBD	Mahakam Ulu	PP & KEU
2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 227.850.200	APBD	Mahakam Ulu	PP & KEU
3			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(Laporan LKPJ, LKJIP, LPPD)	1 Laporan	Rp 72.431.200	APBD	Mahakam Ulu	PP & KEU
4			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 36.559.300	APBD	Mahakam Ulu	PP & KEU
II		Administrasi Keuangan Perangkat		Tersedianya Laporan Keuangan SKPD Bulanan/Triwulan/Tahunan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	2 Laporan	Rp 41.253.135.841	APBD	Mahakam Ulu	

1		Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	321 Orang	Rp 40.055.688.641	APBD	Mahakam Ulu	PP & KEU
2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Rp 1.076.400.000	APBD	Mahakam Ulu	PP & KEU
3			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 67.367.400	APBD	Mahakam Ulu	PP & KEU
4			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Rp 53.679.800	APBD	Mahakam Ulu	PP & KEU
III		Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Unit Kerja yang dilakukan pembinaan menuju pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	Rp 174.820.700	APBD	Mahakam Ulu	
1			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	8 Unit Kerja	Rp 174.820.700	APBD	Mahakam Ulu	PP & KEU
IV		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah SKPD Yang Akurat	Persentase Penyediaan Administrasi BMD	100 Persen	Rp 462.516.000	APBD	Mahakam Ulu	
1			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada UPT	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp 208.976.000	APBD	Mahakam Ulu	UMUM
						1 Laporan	Rp 111.460.000	APBD	Mahakam Ulu	GFK
4			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Rp 142.080.000	APBD	Mahakam Ulu	UMUM
V		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penyediaan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	Rp 307.938.000	APBD	Mahakam Ulu	
2			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Rp 162.090.000	APBD	Mahakam Ulu	UMUM
3				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Rp 145.848.000	APBD	Mahakam Ulu
VI		Administrasi Umum Perangkat		Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 2.332.013.500	APBD	Mahakam Ulu	

		Daerah								
2			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 823.819.500	APBD	Mahakam Ulu	UMUM
3			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Rp 144.000.000	APBD	Mahakam Ulu	UMUM
5			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Rp 911.564.000	APBD	Mahakam Ulu	UMUM
							Rp 275.760.000	APBD	Mahakam Ulu	GFK
6			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Rp 176.870.000	APBD	Mahakam Ulu	UMUM
VI		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pengadaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan BMD Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	3 Unit	Rp 758.183.300	APBD	Mahakam Ulu	
1			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	110 Unit	Rp 758.183.300	APBD	Mahakam Ulu	UMUM
VII		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Pelayanan Administrasi Keuangan Perkantoran	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Rp 36.666.148.400	APBD	Mahakam Ulu	
1			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Rp 137.000.000	APBD	Mahakam Ulu	UMUM
3			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 36.529.148.400	APBD	Mahakam Ulu	UMUM
VIII		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan BMD	12 Bulan	Rp 944.592.000	APBD	Mahakam Ulu	
1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit	Rp 517.192.000	APBD	Mahakam Ulu	UMUM

2			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Rp 200.000.000	APBD	Mahakam Ulu	UMUM
3			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	Rp 227.400.000	APBD	Mahakam Ulu	UMUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					100 Persen	Rp 2.146.121.200	APBD	Mahakam Ulu	
I			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM Di Wilayah Kab/Kota	Tercapainya Pemerataan SDM Kesehatan Diseluruh Fasyankes Kabupaten Mahakam Ulu	Jumlah Fasyankes	8 Fasyankes	Rp 859.066.300	APBD	Mahakam Ulu	
1			Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	Rp 396.551.300	APBD	Mahakam Ulu	SDK
2			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	30 Orang	Rp 288.515.000	APBD	Mahakam Ulu	SDK
		Rp 174.000.000					APBD	Mahakam Ulu	Umum	
I			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pemerataan SDM Kesehatan Diseluruh Fasyankes Kabupaten Mahakam Ulu	Jumlah Fasyankes	8 Fasyankes	Rp 1.227.001.000	APBD	Mahakam Ulu	
2			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	30 Orang	Rp 977.843.000	APBD	Mahakam Ulu	SDK
		Rp 249.158.000					APBD	Mahakam Ulu	GFK	
II			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Data Kesehatan	Jumlah Fasyankes	8 Fasyankes	Rp 60.053.900	APBD	Mahakam Ulu	

1			Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Serta Tindak Lanjut Prizinan Praktif Tenaga Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	18 Dokumen	Rp 60.053.900	APBD	Mahakam Ulu	SDK
C	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					100 Persen	Rp 77.389.842.389	APBD	Mahakam Ulu	
I			Penyediaan Fasillitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP dan UKM Kewenangan	100 Persen	Rp 17.405.914.100	APBD	Mahakam Ulu	
2			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Dokumen	Rp 1.930.191.200	APBD	Mahakam Ulu	GFK
4			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Paket	Rp 1.550.000.000	APBD	Mahakam Ulu	GFK (5 PKM)
						1 Paket	Rp 1.800.000.000	APBD	Mahakam Ulu	GFK (Pustu)
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	Rp 4.300.000.000	APBD	Mahakam Ulu	GFK
6			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	10 Unit	Rp 34.820.500	APBD	Mahakam Ulu	YANKES / GFK
8			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	10 Unit	Rp 408.000.000	APBD	Mahakam Ulu	YANKES

9			Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang di Bangun	2 Unit	Rp 2.412.592.000	APBD	Mahakam Ulu	SDK
12			Pengembangan Puskesmas	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	7 Unit	Rp 2.292.159.200	APBD	Mahakam Ulu	SDK
13			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	3 Unit	Rp 1.833.152.000	APBD	Mahakam Ulu	SDK
14			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	3 Unit	Rp 844.999.200	APBD	Mahakam Ulu	SDK
III		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP dan UKM Rujukan	100 Persen	Rp 59.570.931.489	APBD	Mahakam Ulu		
1			Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	523 Orang	Rp 376.939.400	APBD	Mahakam Ulu	KESGA
4			Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	523 Orang	Rp 127.577.400	APBD	Mahakam Ulu	KESGA
6			Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	503 Orang	Rp 138.199.000	APBD	Mahakam Ulu	KESGA
8			Pengelolaan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2432 Orang	Rp 369.999.000	APBD	Mahakam Ulu	KESGA
9			Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Rp 319.842.370	APBD	Mahakam Ulu	KESGA
15			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	Rp 1.666.547.900	APBD	Mahakam Ulu	KESLING
23			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	Rp 479.724.200	APBD	Mahakam Ulu	KESJAOR
24			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	452 Orang	Rp 413.120.000	APBD	Mahakam Ulu	P2P
26			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	146 Orang	Rp 281.601.900	APBD	Mahakam Ulu	P2P

27			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	515 Orang	Rp 106.468.900	APBD	Mahakam Ulu	P2P
28			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	900 Orang	Rp 50.000.000	APBD	Mahakam Ulu	P2P
29			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	6 Dokumen	Rp 1.368.166.140	APBD	Mahakam Ulu	P2P
32			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	Rp 95.170.420	APBD	Mahakam Ulu	P2P
33			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	Rp 199.530.000	APBD	Mahakam Ulu	P2P
34			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	146 Orang	Rp 129.298.000	APBD	Mahakam Ulu	P2P
37			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	Rp 1.826.683.180	APBD	Mahakam Ulu	P2P
64			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokumen	Rp 10.637.628.906	APBD	Mahakam Ulu	SDK
65			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	Rp 13.437.400.376	APBD	Mahakam Ulu	RS. GSM +JKN
						1 Dokumen	Rp 11.675.839.330	APBD	Mahakam Ulu	RS. NDD + JKN
66			Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Rp 1.864.366.700	APBD	Mahakam Ulu	PKM LAHAM + JKN
						1 Dokumen	Rp 1.810.267.074	APBD	Mahakam Ulu	PKM UBIL+JKN
						1 Dokumen	Rp 1.678.209.376	APBD	Mahakam Ulu	PKM LOPA+JKN
						1 Dokumen	Rp 1.884.484.504	APBD	Mahakam Ulu	PKM LOHU+JKN

						1 Dokumen	Rp 1.564.282.200	APBD	Mahakam Ulu	PKM TO + JKN
						1 Dokumen	Rp 1.436.967.100	APBD	Mahakam Ulu	PKM MAMBES
67			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	Rp 250.000.000	APBD	Mahakam Ulu	YANKES
68			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 180.439.800	APBD	Mahakam Ulu	YANKES
70			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	Rp 481.391.600	APBD	Mahakam Ulu	GFK
						1 Dokumen	Rp 837.549.100	APBD	Mahakam Ulu	YANKES
74			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	6 Dokumen	Rp 829.220.000	APBD	Mahakam Ulu	P2P
77			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 125.950.000	APBD	Mahakam Ulu	Perencanaan Program
						1 Dokumen	Rp 93.425.800	APBD	Mahakam Ulu	Kesga
78			Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	5 Dokumen	Rp 525.355.840	APBD	Mahakam Ulu	P2P
79			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3084 Orang	Rp 281.602.065	APBD	Mahakam Ulu	P2P
80			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11030 Orang	Rp 536.181.300	APBD	Mahakam Ulu	P2P
81			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Dokumen	Rp 169.999.700	APBD	Mahakam Ulu	PROMKES
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	Rp 1.321.502.908	APBD	Mahakam Ulu	YANKES

V		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota		Terpenuhinya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota			Rp 412.996.800			
I			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	6 Unit	Rp 412.996.800	APBD	Mahakam Ulu	YANKES
D	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					100 Persen	Rp 977.974.800	APBD	Mahakam Ulu	
I		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Penggerakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Persentase Penggerakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	100 Persen	Rp 410.188.700	APBD	Mahakam Ulu	
I			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	Rp 410.188.700	APBD	Mahakam Ulu	PROMKES
II		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif, Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota		Terlaksananya Kegiatan GERMAS, Aktivitas Fisik, Pemeriksaan Kesehatan Berkala dan Edukasi Gizi Seimbang	Persentase Terlaksananya Kegiatan GERMAS, Aktivitas Fisik, Pemeriksaan Kesehatan Berkala dan Edukasi Gizi Seimbang	100 Persen	Rp 279.725.400	APBD	Mahakam Ulu	
I			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	Rp 279.725.400	APBD	Mahakam Ulu	PROMKES
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100%	Rp 288.060.700	APBD	Mahakam Ulu	
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	Rp 288.060.700	APBD	Mahakam Ulu	PROMKES
E	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						Rp 195.000.000	APBD	Mahakam Ulu	
I		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat		Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal,		Rp 44.000.000	APBD	Mahakam Ulu	

		Tradisional (UMOT)		(UMOT)	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	Rp 44.000.000	APBD	Mahakam Ulu	GFK
III		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Rp 42.000.000	APBD	Mahakam Ulu	
I			Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	Rp 42.000.000	APBD	Mahakam Ulu	GFK
IV		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Terlaksananya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Rp 51.000.000	APBD	Mahakam Ulu	
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Rp 51.000.000	APBD	Mahakam Ulu	KESLING

			lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)							
IV		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Terlaksananya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Rp 6.000.000	APBD	Mahakam Ulu	
			Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Rp 6.000.000	APBD	Mahakam Ulu	KESLING
V		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Rp 52.000.000	APBD	Mahakam Ulu	
I			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan	Terlaksananya Pemeriksaan Pos Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	10 Produk	Rp 52.000.000	APBD	Mahakam Ulu	GFK
F	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				Total Fertility Rate	2.22 Persen	Rp 1.209.487.200	APBD	Mahakam Ulu	
I		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Pendampingan Sarana Penyuluh dan Pelayanan KB	Persentase Pendampingan Sarana Penyuluh dan Pelayanan KB	100 Persen	Rp 550.317.400	APBD	Mahakam Ulu	
1			Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	Rp 263.384.600	APBD	Mahakam Ulu	KB
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	Rp 286.932.800	APBD	Mahakam Ulu	KB
II		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah		Meningkatkan Angka Prevelansi Pemakaian Kontrasepsi Modern (CPR), Menurunkan Kebutuhan ber KB yang	Operasional dan Sarana di Balai	100%	Rp 659.169.800	APBD	Mahakam Ulu	

		Kabupaten/Kota		tidak terpenuhi ( UNMEED NEED ), Menurunkan Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15 Tahun sd 19 Tahun (ASFR), Menurunkan Kehamilan yang tidak diinginkan pada Wanita Usia Subur ( WUS) Usia 15 thn - 49 tahun.1						
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	Rp 153.440.000	APBD	Mahakam Ulu	KB
			Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	(Pembangunan Keluarga,	1 Laporan	Rp 214.053.100	APBD	Mahakam Ulu	KB
I			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	Rp 291.676.700	APBD	Mahakam Ulu	KB
H	PENGENDALIAN PENDUDUK				Total Fertility Rate	2.22 Persen	Rp 538.240.000	APBD	Mahakam Ulu	
II		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	Rp 538.240.000	APBD	Mahakam Ulu	
1			Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	8 Unit	Rp 167.616.000	APBD	Mahakam Ulu	P4
2			Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	10 Laporan	Rp 370.624.000	APBD	Mahakam Ulu	P4

I	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			Total Fertility Rate	2.22 Persen	Rp 1.236.933.700	APBD	Mahakam Ulu		
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			100%	Rp 1.236.933.700				
1		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	5 Kelompok	Rp 352.194.000	APBD	Mahakam Ulu	K3
2			Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	5 Kelompok	Rp 313.871.300	APBD	Mahakam Ulu	K3
3			Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Tersedianya biaya operasional bagi bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	5 Kelompok	Rp 75.010.000	APBD	Mahakam Ulu	K3
4			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Kelompok	Rp 298.042.400	APBD	Mahakam Ulu	K3

			Ekonomi Keluarga/UPPKA)								
5			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	Rp 197.816.000	APBD	Mahakam Ulu	K3	
TOTAL								<b>Rp 167.055.686.930</b>			

Setelah merumuskan rencana awal perangkat daerah maka akan dilakukan finalisasi melalui rencana akhir perangkat daerah. Adapun sistem penginputan Rencana Kerja (Renja) akan tertuang dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD RI) Perencanaan yang kemudian akan terintegrasi dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA). Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang mengatur berkaitan dengan Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah dan Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.

---

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Catatan Penting**

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Mahakam ulu Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Mahakam ulu 2021-2026.

Renja Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Mahakam ulu Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, dan pendanaan. Untuk tahun 2025 Renja Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Mahakam ulu terdiri dari 7 program 24 kegiatan, dan 54 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 167.055.686.930,- (*Seratus Enam puluh Tujuh Milyarb Lima puluh Lima Juta Enam ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan ratus Tiga puluh Rupiah*).

Renja Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Mahakam ulu Tahun 2025 selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Mahakam ulu dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.

#### **B. Kaidah Pelaksanaan**

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya mental, semangat, kejujuran, dan disiplin pada pelaku pembangunan yang tetap harus dikedepankan.

#### **C. Rencana Tindak Lanjut**

Untuk mencapai target sasaran Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Mahakam ulu yang telah ditetapkan pada tahun 2025 maka perlu didukung dengan program dan kegiatan. Supaya program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam rangka bersinergi.

Mahakam Ulu, 23 Februari 2025  
Kepala Dinas Kesehatan P2KB

  
dr. Petronela Tugan, M.Kes  
NIP. 19780220 201012 2 009